

**HUBUNGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS X  
SMA NEGERI 1 KARTASURA  
TAHUN AJARAN  
2008/2009**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**INDRA SETYO NUGROHO**  
**K 6404035**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

**HUBUNGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS X  
SMA NEGERI 1 KARTASURA  
TAHUN AJARAN  
2008/2009**

**Oleh :**

**INDRA SETYO NUGROHO  
K 6404035**

**SKRIPSI**

**Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan  
Gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pembimbing I

Dr. Sri Haryati, M.Pd  
NIP. 19520526 198003 2 001

Surakarta, Januari 2010

Pembimbing II

Drs. H. Utomo, M.Pd  
NIP. 19491108 197903 1 001

### **PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan TIM Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi

Nama terang

Tanda tangan

Ketua : Drs. Machmud Al Rasyid, SH, M.Si (.....)

Sekretaris : Drs. E.S. Ardianto, M.Pd (.....)

Anggota I : Dr. Sri Haryati M.Pd. (.....)

Anggota II : Drs. H. Utomo M.Pd (.....)

Disahkan oleh :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan.

**Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.**

NIP. 19621126198103 1001

#### *ABSTRACT*

*Indra Setyo Nugroho. RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING CIVIC EDUCATION AWARENESS WITH LAW STUDENT CLASS X SMA NEGERI 1 KARTASURA ACADEMIC YEAR 2008/2009. Essay, Surakarta: Faculty of Science Teaching and Education, University of Eleven March Surakarta, August 2009.*

*This study aims to determine the relationship between positive and significant learning Citizenship Education law student with awareness class X SMA Negeri 1 Kartasura Teaching Year 2008/2009. In line with the problem and research purposes, then this research using descriptive method korelational. Population in this research is a class X student SMAN 1 Teachings Kartasura Year 2008/2009.*

*Sample taken random sampling technique with a number of 40 students. free variables in this research is learning Citizenship Education and awareness bound variable is law. Data collection technique that is used is to use the tool collector in the form of test data and angket containing a list of written questions. Technical analysis is a technique used correlation analysis tangkar moment. Based on the results of research can be concluded that there is a relationship between positive and significant learning Citizenship Education with the awareness of law students ( $r_{xy} > r_{table}$  or  $0,4033 > 0.297$ ) and ( $t_{arithmetic} > t_{table}$  or  $2.968 > 1.68$ ) on the on the extend significations 5%.*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini dipersembahkan kepada :

- Ibu dan bapak tercinta, atas segala dorongan, kasih sayang dan doanya.
- Adik tersayang ( Anis)
- Hobbiet untuk semangatnya
- Teman-teman PKn '04
- Almamater

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak selama persiapan, pelaksanaan sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Untuk

itu dalam kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS.
2. Bapak Drs. Syaiful Bachri, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS.
3. Ibu Dr. Sri Haryati M.Pd. selaku Ketua Program PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dan Pembimbing 1 yang telah berkenan memberi ijin dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Utomo M.Pd sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Juara selaku kepala sekolah yang telah memberikan ijin *try out* dan penelitian di SMA Negeri 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
6. Bapak Muchodjadi S.Pd selaku guru PKn SMA Negeri 1 Kartasura atss segala bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang memerlukan.

Surakarta, Februari 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN ABSTRACT .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi

KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum.....	6
a. Pengertian Kesadaran.....	6
b. Pengertian hukum.....	6
c. Sumber Hukum.....	7
d. Pengertian Kesadaran Hukum.....	9
e. Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum.....	10
f. Peningkatan Kesadaran Hukum.....	11
g. Definisi konseptual.....	11
h. Definisi operasional.....	11
2. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan.....	12
a. Pengertian Pembelajaran.....	12
b. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	15
c. Sejarah dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	17
d. Definisi konseptual.....	18
e. Definisi operasional.....	18
B. Kerangka Pemikiran.....	18
C. Perumusan Hipotesis.....	19
BAB III. METODE PENELITIAN	



A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
B. Metode Penelitian.....	21
C. Populasi dan Sampel.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Data.....	40
B. Pengujian Persyaratan Analisis.....	43
C. Pengujian Hipotesis.....	43
D. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	44
<b>BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Implikasi.....	46
C. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>

### **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	19
Tabel 2. Jumlah Populasi Penelitian.....	24
Tabel 3. Tingkat Kesukaran.....	30
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Nilai Pembelajaran PKn.....	41
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Nilai Kesadaran Hukum.....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 2. Histogram Pembelajaran PKn.....	41
Gambar 3. Histogram Kesadaran Hukum.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kisi-kisi Tes Pembelajaran PKn.....	50
Lampiran 2. Uji coba Tes Pembelajaran PKn .....	51
Lampiran 3. Data hasil Uji Coba Tes Pendidikan Kewarganegaraan.....	60
Lampiran 4. Contoh Perhitungan Uji Validitas Hasil Uji Coba Variabel Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	63
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pembelajaran PKn.....	64
Lampiran 6. Tes Pembelajaran Kewarganegaraan .....	66
Lampiran 7. Kisi-kisi Angket Kesadaran Hukum.....	74
Lampiran 8. Uji coba Angket Kesadaran Hukum .....	75

Lampiran 9. Data hasil uji coba angket Kesadaran Hukum.....	79
Lampiran 10. Contoh Perhitungan Uji Validitas Hasil Uji Coba Variabel Kesadaran Hukum.....	82
Lampiran 11. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Hukum .....	83
Lampiran 12. Angket Kesadaran Hukum .....	85
Lampiran 13. Perhitungan Korelasi Belahan Ganjil dan Genap dan Uji Reliabilita Spearman Brown.....	89
Lampiran 14. Data Induk Penelitian.....	90
Lampiran 15. Uji Normalitas Variabel Pembelajaran PKn .....	91
Lampiran 16. Uji Normalitas Variabel Kesadaran Hukum.....	92
Lampiran 17. Uji Keberartian dan Linieritas.....	93
Lampiran 18. Uji Independensi.....	97
Lampiran 19. Uji Keberartian Koefisien Korelasi.....	98
Lampiran 20. Garis Regresi Sederhana Y atau X.....	99
Lampiran 21. Surat Permohonan Menyusun Skripsi Kepada Dekan FKIP UNS.....	100
Lampiran 22. Surat Keputusan Dekan FKIP UNS tentang menyusun Skripsi ..	101
Lampiran 23. Surat Permohonan Ijin <i>Try Out</i> Kepada Rektor UNS.....	102
Lampiran 24. Surat Permohonan Ijin <i>Try Out</i> Kepada Kepala SMA N 1 Kartasura.....	103
Lampiran 25. Surat Keterangan telah melakukan <i>Try Out</i> /Penelitian dari Kepala SMA N 1 Kartasura.....	104

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun berada. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas disamping memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik.

Tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Unesco dalam E. Mulyasa (2005:5) mengemukakan, “Dua prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan Pancasila: *pertama*; pendidikan harus diletakkan dalam empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*); *kedua*, belajar seumur hidup (*life long learning*)”.

Dalam dunia pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting. Hal ini mengingat Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan dan menghasilkan manusia-manusia yang mampu berwarga negara yang baik dan benar yang sadar akan hak maupun kewajibannya.

Dalam ruang lingkup sekolah terdapat peraturan yang mengatur seluruh warga sekolah yaitu tata tertib sekolah. Banyak terjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh para siswa terutama kelas X SMA Negeri 1 Kartasura dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Kartasura yang menunjukkan dimana terjadi kenaikan tingkat angka kenakalan siswa kelas X yang signifikan. Salah satu bentuk kenakalan yang menonjol diantaranya yaitu membolos, berkelahi, merokok dan membawa *handphone* di lingkungan sekolah. Para siswa terutama kelas X terbiasa melakukan bolos sekolah di tempat dalam maupun luar lingkungan sekolah. Tempat favorit yang sering kali digunakan untuk membolos saat jam sekolah ialah di kantin sekolah meskipun para guru secara rutin mengadakan razia baik di dalam kantin sekolah maupun di kelas untuk merazia *handphone* yang dibawa para siswa di dalam kelas. Tak jarang para siswa yang tertangkap razia sedang membolos di kantin kedapatan sedang merokok padahal secara jelas dilarang dalam tata tertib sekolah dan dikenai hukuman atau sanksi yang tegas dari pemberian hukuman, poin hingga pemanggilan para orang tua atau wali murid.

SMA Negeri 1 Kartasura sebagai salah satu sekolah yang terfavorit dilingkungan wilayah Kabupaten Sukoharjo, selalu berusaha dengan tegas penerapan hukuman bagi setiap pelanggaran dan pemberlakuan poin sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Meskipun kurikulum sekolah sudah menetapkan adanya Pendidikan Kewarganegaraan maupun Bimbingan dan Konseling yang diharapkan mampu mengantisipasi kenakalan siswa dan sekolah sudah melaksanakan dengan baik akan tetapi pada kenyataannya masih ditemukan adanya tindakan kenakalan siswa seperti merokok, membolos maupun berkelahi dengan siswa lain maupun sekolah lain atau tawuran.

Dalam sekolah telah diberlakukan tata tertib yang memberi sanksi yang tegas masih banyak terjadi pelanggaran padahal sudah diberlakukan sistem poin dan sanksi yang tegas sesuai dengan bentuk pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Meskipun dalam SMA Negeri 1 Kartasura sudah dibuat peraturan tata tertib sekolah dan diajarkan materi tentang pentingnya hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan masih saja terjadi pelanggaran maupun kenakalan para siswa.

Munculnya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura dipengaruhi beberapa indikator, antara lain :

- 1) Faktor Intern, berupa minat dan bakat dari siswa sendiri yang secara tidak langsung berhubungan dengan kepribadian.
- 2) Faktor Ekstern, berupa pengaruh dari kondisi lingkungan sosial siswa antara lain dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan pola perilaku misalnya,

kurangnya penanaman pengetahuan dan pemahaman kepada para siswa untuk mentaati dan menyadari arti penting hukum

Kesadaran akan hukum dari para siswa sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan tenteram terutama dalam lingkungan sekolah. Akan tetapi meskipun dalam sekolah sudah dibuat peraturan tata tertib dan diajarkan materi tentang pentingnya hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan masih saja terjadi kurangnya kesadaran para siswa SMA Negeri 1 Kartasura untuk mentaati padahal sudah diberlakukannya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

Untuk meningkatkan moral dan budi pekerti pada setiap siswa diperlukan adanya tindakan kerja sama dari berbagai pihak antara lain guru bidang studi maupun Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Kartasura kepada para siswanya untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum melalui kegiatan belajar mengajar maupun mengadakan seminar tentang hukum demi meningkatkan moral dan budi pekerti dari setiap siswa yang kelak akan terjun dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Hubungan antara Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura.
2. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura.
3. Tingginya signifikasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura.
4. Tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
5. Hubungan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dalam penelitian ini membatasi pada masalah :

Hubungan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura

#### **F. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai hubungan pembelajaran PKn dengan kesadaran hukum siswa.
- b. Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang relevan.

##### 2. Manfaat Praktis

Memberi informasi tentang pentingnya pembelajaran PKn bagi pendidik dalam meningkatkan kesadaran hukum setiap anak didiknya yang kelak menjadi generasi muda penerus bangsa.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Tinjauan tentang kesadaran hukum

##### b. Pengertian Kesadaran

Kesadaran itu sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai definisi yaitu “keinsafan, kesadaran mengerti akan harga dirinya yang timbul karena diperlakukan secara tidak adil”. Sedangkan pengertian lainnya tentang kesadaran ialah “hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang “,( Tim Penyusun Kamus P3B,1995:40).

Kesadaran itu sendiri bersangkutan dengan sifat atau perilaku seseorang yang berhubungan dengan hati nurani setiap manusia jadi kesadaran tersebut tidak dapat dipaksakan tetapi dapat juga melalui penanaman paham maupun doktrin karena manusia itu sendiri merupakan makhluk Tuhan paling sempurna yang dianugerahi cipta, rasa dan karsa, jadi manusia dapat merasakan dengan pikiran dan secara sadar dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

##### c. Pengertian Hukum

Kata hukum sendiri sangat akrab dengan kita, karena sejak zaman dahulu dalam kehidupan manusia yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang disebut dengan hukum. Hukum sendiri merupakan suatu aturan atau kaidah baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis sangat mempengaruhi pola tingkah laku baik individu maupun kelompok dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Ilhami Bisri (2004:4) berpendapat, “Hukum adalah sistem aturan yang diciptakan melalui mekanisme tertentu artinya hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum yaitu badan legislatif.”

Sedangkan A.W. Widjaja (1984 : 2) menyatakan, “Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.

Hukum sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukan pada sistem norma atau sistem aturan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat sistematis yang berlaku. Secara sistematis dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang unsur-unsur, sub-sub sistem atau elemen-

elemennya saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat maupun memperlemah antara satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hukum sendiri terdapat sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan dalam setiap pelanggaran bisa berupa paksaan badan atau penjara yang bervariasi sejak dari hukuman kurungan, penjara sampai dengan hukuman mati. Dapat juga berupa denda dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.

d. Sumber Hukum

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1) Pancasila

Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila menjadi kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi bangsa Indonesia yaitu tentang kemerdekaan, peri kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ilhami Bisri ( 2004 : 7) menyatakan, “Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi fisiologis maupun yuridis.”

2) UUD 1945

Ilhami Bisri (2004 : 9) menyatakan ”UUD 1945 merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan RI “

Dalam UUD 1945 sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a) Pembukaan UUD 1945

Dalam pembukaan terdapat tujuan negara Indonesia selain itu juga terdapat pokok-pokok pikiran yang secara substansial kemudian terangkum dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial Kedaulatan Rakyat berdasar atas Kerakyatan dan Permusyawaratan Perwakilan, Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Beradab.

b) Batang tubuh UUD 1945

UUD 1945 terdiri dari 37 pasal ditambah dengan 4 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan. Sedangkan pada amandemen UUD 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 tidak terjadi perubahan yang begitu signifikan terhadap jumlah pasal. Dalam UUD 1945 hasil amandemen masih terdiri dari 37 pasal, akan tetapi terdapat perubahan pada sejumlah ayat-ayatnya yang sekarang lebih signifikan dan memuat tentang pemerintahan dan warga negaranya yang lebih detail

dan lengkap.

### 3) Undang-undang

Ilhami Bisri (2004 : 9) menyatakan “Secara yuridis Undang-undang (dalam perspektif hukum) memiliki dua makna yaitu secara formal dan informal”

Adapun dua makna Undang-undang seperti yang dinyatakan oleh Ilhami Bisri (2004 : 9) adalah sebagai berikut :

- a). Undang-undang secara formal adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu DPR dan presiden.
- b). Undang-undang secara material adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan) yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, agama dan dimensi kehidupan yang lainnya.

### 4) Traktat (*treaty*)

Ilhami Bisri (2004 : 36) menyatakan, “Traktat (*treaty*) ialah produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan antarnegara.”

Adapun macam traktat seperti yang dinyatakan oleh Ilhami Bisri (2004 : 9) adalah sebagai berikut :

- a). Traktat bilateral yang diciptakan oleh dan melibatkan dua negara. Misalnya perjanjian tentang batas negara antara Indonesia dengan Singapura.
- b). Traktat Multilateral yaitu perjanjian antara negara yang melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya perjanjian pembentukan ASEAN, PBB, OPEC dan sebagainya.

### 5) Doktrin atau Pendapat para ahli

“Doktrin atau pendapat para ahli merupakan sumber hukum yang sangat penting bagi ilmu hukum dan perkembangannya karena kemajuan pemikiran tentang hukum sangat bergantung antara lain kepada pendapat yang dikemukakan ahli hukum untuk mensikapi fenomena yang terjadi setiap waktu. Perkembangan hukum dan ilmu hukum merupakan keharusan dalam dunia hukum sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat pesat.” (Ilhami Bisri , 2004 : 37)

### d. Pengertian Kesadaran Hukum

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kesadaran hukum hendaknya kita harus mengetahui terminologi dari kesadaran hukum. Dilihat dari kata pembentuknya kesadaran dapat diartikan sebagai perasaan memahami keadaan di sekitar kita yang menimbulkan keyakinan dan dapat menentukan perilaku seseorang dalam setiap tindakan. Sedangkan hukum itu sendiri sangat sulit untuk dicari definisi bakunya. Akan tetapi untuk menyimpulkan bahwa hukum mengandung beberapa unsur, yaitu :

- 1) Mengatur tingkah laku manusia

- 2) Dibuat oleh badan yang berwenang
- 3) Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan
- 4) Memiliki sanksi bila dilanggar

Soerjono Soekanto ( 1982: 152) berpendapat, “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.”

Sedangkan OK Chairuddin (1991 : 106) menyatakan, “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran dalam kehidupan manusia untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum”.

Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

e. Penyebab rendahnya kesadaran hukum

Rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan.
  - 2) Mentalitas yang kurang baik dari penegak hukum oleh karena sikap tindaknya yang :
    - a) Impuls
    - b) Emosional
    - c) Didasarkan pada :
      - (1) Kekayaan material
      - (2) Kekuasaan
      - (3) Kedudukan
      - (4) Ketenaran
  - 3) Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai.
  - 4) Pemberian contoh yang kurang baik dalam sebagai penataan dari golongan panutan
  - 5) Membudayanya “ *Shame culture*” ( dan bukan “ *Guilt culture*”)
  - 6) Kecenderungan untuk senantiasa melaksanakan “*beleid*”.
  - 7) Lebih mementingkan kelaziman daripada kebenaran.
- (Soerjono Soekanto 1983: 98)

Setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai taraf kesadaran hukum yang berbeda-beda yaitu kesadaran hukum yang tinggi dan kesadaran hukum yang rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian rendahnya kesadaran hukum adalah suatu penilaian yang tidak tahu atau paham, tidak mengerti akan sistem hukum, adanya perilaku menyimpang dari hukum, kepatuhan hukum yang rendah yang hanya mengetahui hukum tetapi berperilaku tidak sesuai dengan hukum sehingga cenderung pada tindakan pelanggaran hukum.

f. Peningkatan kesadaran hukum

Dalam kesadaran hukum diperlukan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pengetahuan. Adapun, peningkatan kesadaran hukum dan penyuluhan hukum yang teratur dengan dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan utama agar warga masyarakat tahu mengenai perkawinan, pajak, pertanahan dan seterusnya,. Yang dijelaskan melalui penerangan hukum mungkin hanya pasal-pasal dari suatu undang-undang misalnya, agar masyarakat merasakan manfaatnya, penerangan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang pada suatu saat dihadapi oleh bagian masyarakat yang menjadi sasaran penerangan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya setelah diadakannya penerangan hukum. Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar para warga masyarakat memahami hukum-hukum sesuai yang sedang dihadapinya pada suatu saat. Penyuluhan hukum dapat berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya apabila hukum tersebut ditaati. ( Soerjono Soekanto, 1983: 127)

Tujuan dari penerangan dan penyuluhan hukum tidak hanya sekedar agar setiap warga masyarakat mengetahui adanya suatu hukum yang berlaku secara sah, tetapi juga agar setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

g. Definisi konseptual

Berdasar berbagai pendapat tentang kesadaran hukum diatas maka dapat dirumuskan konsep kesadaran hukum adalah perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

h. Definisi operasional

Atas dasar konsep tersebut maka dapat dirumuskan indikator kesadaran hukum bahwa:

Indikator untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum yang bersangkutan meliputi:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- 2) Pengetahuan tentang sisi peraturan-peraturan hukum
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- 4) Pola-pola perilaku hukum

## 2. Tinjauan tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pembelajaran

Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar adalah suatu proses pribadi, tetapi

juga proses sosial yang terjadi ketika masing masing orang berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan pengetahuan bersama.

Menurut Oemar Hamalik (2003:57), "Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran."

E. Mulyasa (2007:117) berpendapat, "Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan".

Definisi lain dari pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau siswa.

Adapun unsur-unsur dalam pembelajaran tersebut, antara lain :

#### 1) Peserta Didik

Dalam suatu kegiatan pembelajaran memerlukan unsur anak didik atau siswa sebagai sasaran pendidikan atau pembelajaran, yaitu anak yang memerlukan bimbingan dari para orang dewasa untuk mengembangkan segenap potensinya.

Soedomo Hadi (2003:19) berpendapat, "Peserta didik yang dimaksud adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan pertolongan dan bimbingan dari pihak lain (orang dewasa) agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu pribadi (individu mandiri)."

Jadi peserta didik atau siswa adalah individu yang belum dewasa, yang masih memerlukan bimbingan dari orang yang lebih dewasa dalam upaya untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya serta lahir maupun batin.

#### 2) Pendidik

Pendidik adalah orang dewasa yang hal ini adalah guru, mempunyai tanggung jawab terhadap anak untuk menghantarkan anak supaya dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan dan rumusan yang telah ditetapkan dalam tahap-tahap perkembangan setiap individu.

Soedomo Hadi (2003:20) berpendapat, "Pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik, dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri memenuhinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan sebagai individu atau pribadi yang mandiri.

Jadi, pendidik adakah orang dewasa yang bertanggung jawab atas anak didik dalam memberikan bimbingan sehingga individu tersebut dapat mencapai tingkat kedewasaan sehingga menjadi individu yang mandiri di tengah –tengah masyarakat.

### 3. Interaksi Belajar Mengajar

Dalam suatu kegiatan pembelajaran diperlukan adanya suatu interaksi. Bahwa interaksi yang dimaksud adalah interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik dalam upaya mencapai tujuan dan menyerap pesan yang disampaikan pendidik kepada anak didik.

Pelaksanaan pendidikan dapat berlangsung dalam suatu interaksi antara pendidik dan anak didik. Interaksi lebih efektif kalau anak sendiri aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Aktifitas anak didik dalam kegiatan interaksi edukatif merupakan syarat yang penting untuk keberhasilan mereka dalam menyerap dan memiliki norma-norma yang menjadi pesan atau isi kegiatan interaksi atau komunikasi edukatif. (Soedomo Hadi, 2003:22)

### 4. Isi Pendidikan

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan atau pembelajaran didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan juga ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Isi kurikulum itu merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Isi pendidikan atau bahan pendidikan yaitu segala sesuatu yang disajikan oleh pendidik agar menjadi anak didik untuk perkembangannya agar tercapai tujuannya. Pedoman untuk memilih isi pendidikan yaitu : a. Isi pendidikan wajib memenuhi tujuan pendidikan, b. Isi pendidikan wajib sambung menyambung (kontinu), c. Semua jenis isi pendidikan harus merupakan kebulatan, d. Arah semua serta irama gerak maju harus sama (ada sinkronisasi). Dengan demikian tujuan-tujuan tersebut satu dengan lainnya saling mempengaruhi dan berkaitan sehingga menjadi satu tujuan tersebut. (Soedomo Hadi 2003:26)

### 5. Lingkungan

Kegiatan pembelajaran atau pembelajaran dimanapun selalu berlangsung dalam suatu lingkungan dan keadaan tertentu baik lingkungan yang berkenaan dengan maupun waktu, karena pengaruh lingkungan berperan besar dalam proses dan hasil pendidikan yang dilaksanakan, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pendidik harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat memberikan pengaruh positif baik secara lahir maupun batin kepada anak didik.

Pengaruh lingkungan terhadap anak didik sifatnya tidak sengaja dan bukan berarti sedikit sekali pengaruhnya dalam perkembangan anak didik, karena besarnya pengaruh tidak sengaja dalam perkembangan anak didik ada

lingkungan ini maka disebut juga pendidik yang tersembunyi. hal ini disebabkan karena kadang-kadang anak didik lebih tertarik mengikuti pengaruh lingkungan yang sengaja oleh pendidik dalam suatu kegiatan pendidikan. (Soedomo Hadi, 2003:26)

b. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan didalam suatu konsep pendidikan sangatlah perlu diberikan kepada seorang siswa yang menempuh suatu jenjang pendidikan baik itu SD,SMP maupun di SMA serta perguruan tinggi karena pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam pembentukan moral dan budi pekerti seseorang dalam kehidupan bernegara.

Sumarsono (2002:3) menerangkan,"Pendidikan Kewarganegaraan adalah dimaksudkan agar warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Sedangkan menurut Syahrial Syarbaini dkk (2006:4), "Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kulikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmu kewarganegaraan."

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran berdasarkan jurnal internasional menurut pendapat Mr. Larry Bimi yang dikutip dari *Journal Internasional of Definition Civic Education as Subject*, [http// www. Wikipedia. Com](http://www.Wikipedia.Com) menyatakan, "*Said that postings to there was the need for what he he described as socio cultural revolution to beef up the democratic gains. We can only do this bey a systematic and strategic teaching of children to acquire civic respon capability valves as they are growing.*"

Artinya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi yang menjadi strategi dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis.

Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab

secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah.

Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara kita ketika



mereka pertama kali merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang :

- 1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- 2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- 4) Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945

Maka dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang berpartisipasi aktif dalam rangka membangun sistem pendidikan yang maju dan modern.

Dalam pembelajaran PKn kelas X kompetensi yang diajarkan terkait dengan kesadaran hukum terlihat dalam ketentuan Standar Kompetensi :

“ Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional”.

Selanjutnya Kompetensi Dasar yang harus dikuasai oleh para siswa adalah “Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”

Indikator yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah :

- 1) Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum
- 2) Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 3) Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

c. Sejarah dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan tuntutan zaman dan pergantian rezim.

Pendidikan kewarganegaraan dimulai dengan mata pelajaran kewarganegaraan (1957), Civic (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila / PMP (1975 dan 1984), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / PPKn (1994) dan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (2004). (Winarno, 2005:8)

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang dikenal dengan mata pelajaran “*Civic*” di sekolah dasar dan merupakan embrio dari “*Civic Education*” sebagai “*the body of knowledge*”.

Tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik dalam hal :

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isi kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Winarno, 2005:11)

Tujuan PKn menurut Eric yang dikutip dalam *Journal International of Definition Civic Education as Subject* dari <http://www.Geogle.com>. bahwa, ” *The first objective of civic education is to teach thoroughly the meaning of the most basic idea, so that students will know what a constitutional democracy is and what it is not .*”

Artinya bahwa tujuan pertama pendidikan kewarganegaraan adalah teliti di dalam mengajar sehingga siswa akan mengetahui apa yang termasuk konstitusional dan demokrasi ataupun dengan yang tidak konstitusional dan

tidak demokrasi sehingga siswa diharapkan dapat membedakan diantara keduanya.

e. Definisi konseptual

Pembelajaran PKn secara konseptual dalam Standar Kompetensi yaitu : “ Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional”.

f. Definisi operasional

Dalam pembelajaran PKn secara operasional Kompetensi Dasar yaitu : “Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Sedangkan Indikator yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah :

- 1) Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum
- 2) Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 3) Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku.

## B. Kerangka Pemikiran

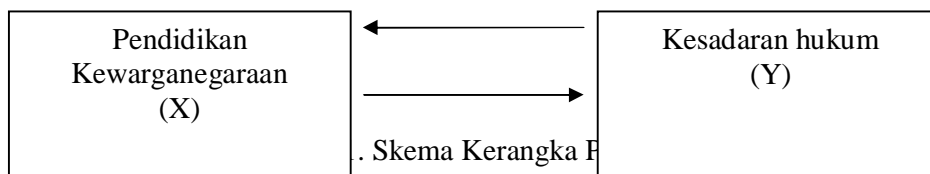
Kerangka pemikiran merupakan acuan yang digunakan di dalam melakukan suatu penelitian. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pembelajaran merupakan gabungan antara pengetahuan, ketrampilan dan faktor sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi. Suatu pembelajaran dikatakan dapat berhasil apabila penyampaian materi pelajaran yang didapatkan oleh para siswa dapat dipahami serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja, tetapi juga di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Pembelajaran Kewarganegaraan perlu ditanamkan sejak dini dalam pendidikan sekolah karena dalam mata pelajaran tersebut mempunyai konsep dalam pembentukan moral dan budi pekerti seseorang dalam kehidupan bernegara. Salah satu aspek yang dipelajari adalah bidang hukum. Dalam KTSP ( Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ) memuat materi tentang kesadaran hukum, maka hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum adalah saling berhubungan.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



### C. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, secara teknis dapat diperoleh jawaban sementara atas masalah penelitian ini. Jawaban sementara ini merupakan jawaban yang paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya.

“Secara teknis hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara teoritis hipotesis merupakan pernyataan yang akan diujikan melalui statistik sampel”. (Soetardi, 1990:43)

Dalam Penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kartasura yang berada di Jalan Solo-Jogja, Kartasura, Sukoharjo 57168. Pemilihan tempat penelitian tersebut dilakukan karena di sekolah tersebut terdapat permasalahan serta tujuan penelitian yang dilakukan. Selain itu lokasi sekolah tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga akan mempermudah dalam memperoleh data.

#### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2008 sampai dengan Januari 2010, yang selanjutnya dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	2008		2009												2010
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Pengajuan judul	xx														
Penyusunan proposal		xx	xx	xxx	xx	xx	xx								
Perijinan							xx								
Penyusunan instrumen								xx							
Pengumpulan data									xx						

Analisis data										xx					
Penyusunan laporan										xx	xx	xx	xx	xx	xx

20

## litian

Suatu penelitian i bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang di tersebut dapat tercapai diperlukan penggunaan suatu cara yang i kan secara terencana dan sistematis. Cara atau metode yang dipilih dengan tepat untuk memecahkan permasalahan yang dikaji akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menentukan hasil penelitian yang dilakukan.

Menurut Winarno Surakhmad (1998: 131), “Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah “studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam suatu studi melalui penyelidikan terhadap suatu masalah sehingga mendapat penyelesaian masalah yang tepat.

Macam metode penelitian yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

### 1. Metode Penelitian Sejarah (Historis)

Penelitian yang menggunakan metode penelitian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Metode historis dapat juga dikatakan sebagai suatu proses yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun yang timbul di masa lampau, untuk menemukan kesimpulan yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah yang dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan memperkirakan yang akan datang.

### 2. Metode Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. Metode penelitian deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Tujuan utama dalam menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat dari suatu keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan dan menjelajahi penyebab dari gejala-gejala tertentu. Ada beberapa jenis penelitian deskriptif yang dapat digunakan yaitu studi kasus, survei, penelitian pengembangan, penelitian lanjutan, analisis dokumen, analisis kecenderungan, dan penelitian korelasi.

### 3. Metode Penelitian Eksperimen

Penelitian eksperimental merupakan penelitian pengujian hipotesa yang menguji hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Dalam

penelitian ini, peneliti memanipulasi sekurang-kurangnya satu variabel bebas, mengontrol variabel lain yang sesuai, dan mengamati pengaruh dari satu atau lebih variabel terikat.

4. Metode Penelitian *Ex Post Facto* ( Kausal Komparatif )

Metode penelitian *ex post facto* merupakan metode penelitian dengan cara menguji hubungan variabel yang terwujud sebelumnya. Peneliti berusaha untuk menentukan sebab dari kelompok-kelompok yang berbeda pada beberapa variabel dengan mengamati variabel-variabel yang akan menimbulkan akibatnya.

5. Metode Penelitian Partisipatori

Metode penelitian partisipatori adalah metode penelitian dengan mengakui kemampuan orang-orang untuk menemukan, mengorganisasikan dan menggunakan pengetahuan. Penelitian ini memberikan dorongan seorang peneliti untuk menguji kembali beberapa penelitian praktis pada disiplin yang ditekuni. (Consuelo G. Sevilla et al, 1993: 40)

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar (2000: 4), terdapat 9 macam penelitian yaitu :

- “ 1. Penelitian Historis
2. Penelitian Deskriptif
3. Penelitian Perkembangan
4. Penelitian Kasus dan Lapangan
5. Penelitian Korelasional
6. Penelitian Komparatif
7. Penelitian Eksperimental Sungguhan
8. Penelitian Eksperimental Semu
9. Penelitian Tindakan ”

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan judul penelitian maka dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif korelasional. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif korelasional karena peneliti memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang bersifat aktual dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disusun, dijabarkan, kemudian dianalisis untuk disimpulkan.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor, berhubungan dengan satu variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud mengungkapkan bentuk hubungan timbal balik antara variabel yang diselidiki. Intensitas hubungan itu diukur dengan menggunakan prosedur matematis yang menyatakan koefisien korelasi yang dapat bergerak dari -1,00 sampai dengan +1,00.

### C. Populasi dan Sampel

Pelaksanaan penelitian tidak terlepas dari populasi dan sampel karena merupakan subjek dalam penelitian. Agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, maka populasi dan sampel diambil secara tepat. Sampel yang diambil harus representatif, yakni mewakili populasi.

#### 1. Populasi Penelitian

Sebelum menetapkan populasi, kiranya terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian populasi. Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108), adalah “keseluruhan subyek penelitian”.

Sedangkan menurut Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah (2007: 119), “Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti”. Dengan demikian yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan satuan untuk dikenai hasil kesimpulan dari suatu penelitian

Alasan peneliti menggunakan populasi adalah seluruh obyek penelitian yang diteliti merupakan seluruh siswa kelas X yang mendapat materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 286 siswa dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Jumlah Populasi Penelitian

No.	Kelas X	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	A	15	21	36
2.	B	15	21	36
3.	C	16	21	36
4.	D	16	21	36
5.	E	16	21	36
6.	F	16	21	36
7.	G	16	20	35
8.	H	16	20	35
Jumlah		126	160	286

#### 2. Sampel Penelitian

Suharsimi Arikunto (1998:103) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah sebagian dari populasi yang diwakili dari sasaran penelitian”. Pengambilan sampel digunakan untuk efisiensi dalam penelitian tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan yaitu waktu, tenaga dan biaya peneliti tanpa mengurangi keabsahan penelitian itu sendiri. Mengingat jumlah populasi ada 286 orang, maka peneliti hanya akan mengambil sebagian dari jumlah populasi yang menggunakan sampel.

Agar sampel yang diambil representatif maka berdasarkan ketentuan Suharsimi Arikunto (2002: 112) yang menyebutkan bahwa :

“Untuk sekedar acuan-acuan maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

- 1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.

- 2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek.
- 3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka peneliti menentukan besar sampel sebanyak 40 orang yang diperoleh 14% dari seluruh kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 286 siswa. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Sutrisno Hadi (2004: 83) menyatakan, "Pada dasarnya teknik sampling dapat dibagi menjadi dua yaitu teknik random sampling teknik non-random sampling"

Adapun macam dari teknik sampling seperti penjelasan diatas adalah :

- 1) Teknik Random Sampling  
Prosedur random sampling meliputi
  - a) Cara Undian, yaitu pengambilan sampel secara undian.
  - b) Cara Ordinal, yaitu memilih nomor genap atau ganjil atau kelipatan tertentu.
  - c) Cara Randomisasi dari tabel bilangan random.
- 2) Teknik Non-Random Sampling meliputi:
  - a) *Proportional sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan sub-sub populasi.
  - b) Teknik *stratified sampling* yaitu pengambilan sampel apabila populasi terdiri dari susunan kelompok-kelompok yang bertingkat.
  - c) Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
  - d) Teknik *quota sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pada quantum.
  - e) Teknik *double sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang mengusahakan adanya sampel kembar.
  - f) Teknik area probability sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan cara pembagian sampel berdasarkan pada pembagian area.
  - g) Teknik *cluster sampling* yaitu pembagian sampel berdasarkan atas kelompok yang ada pada populasi.

Untuk teknik pengambilan sampel penulis melakukan secara proporsional random sampling yang artinya besar kecilnya sub populasi atau



bagian individu-individu yang diambil tiap sub populasi diambil secara proporsional dan random atau acak. Dengan teknik pengambilan sampel secara proporsional random sampling maka setiap anggota populasi akan mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.

Adapun gambaran teknik pengambilan sampel sebagai berikut :

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Alasan penulis menggunakan teknik tersebut karena dalam teknik random sampling bersifat secara objektif. Pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengambilan dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan sub-sub populasi yaitu tiap-tiap kelas.

Dalam pengambilan sampel tersebut menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa setiap kelas}}{\text{Jumlah populasi}} \times \text{jumlah sampel}$$

$$\frac{36}{286} \times 40 = 5$$

Jadi, setiap kelas yang digunakan sebagai sampel sebanyak 5 anak

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam suatu penelitian, data merupakan faktor yang sangat penting, pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipercaya dalam penelitian.

Menurut Winarno Surakhmad (1994:162) ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

1. Teknik observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang diadakan.
2. Teknik observasi tidak langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada ( yang semula tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), maupun yang disengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.
3. Teknik komunikasi langsung, yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian baik di dalam situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi buatan.

4. Teknik komunikasi tak langsung, yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian dengan perantara alat, baik alat yang tersedia maupun alat khusus dibuat untuk keperluan itu . Pelaksanaannya dapat berlangsung didalam situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi buatan.

Di dalam praktek mungkin saja terjadi kombinasi atau modifikasi teknik-teknik tersebut diatas apabila dianggap perlu untuk memperoleh data yang relevan. Namun, diantara berbagai teknik pengumpulan data yang ada peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik komunikasi tak langsung. Untuk menjangkau data pembelajaran PKn dan kesadaran hukum maka menggunakan instrumen tes dan angket.

### 1. Metode Tes

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 139), “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Langkah-langkah dalam menyusun tes terdiri dari :

- a. Membuat kisi-kisi soal tes.
- b. Menyusun soal-soal tes.
- c. Mengadakan uji coba tes.
- d. Menguji validitas dan reliabilitas tes.
- e. Revisi butir-butir tes.

Tes ini memuat beberapa pertanyaan yang berisi tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari 35 soal tes obyektif dengan 5 alternatif jawaban. Adapun pemberian skor pada setiap jawaban adalah jika benar skor 1 dan jika salah skor 0.

Tujuan uji coba ini adalah untuk melihat apakah instrumen yang telah disusun tersebut valid, reliabel, memiliki tingkat kesukaran soal yang sesuai dan memiliki konsistensi internal yang baik atau tidak. Karena untuk mendapatkan instrumen yang benar dan akurat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya valid, reliabel, memenuhi tingkat kesukaran yang sesuai dan konsistensi internal.

Cara untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut adalah:

#### a. Validitas Isi

Suatu instrumen disebut valid menurut validitas isi jika isi instrumen tersebut telah merupakan sampel yang representatif dari

keseluruhan yang akan diukur. Dikatakan oleh Nunnally dalam Budiyo (2003: 58) bahwa, “Dua standar utama untuk meyakinkan adanya validitas isi, yaitu (1) koleksi butir-butir soal yang representatif terhadap semestanya, dan (2) metode penyusunan tes yang masuk akal (*sensible*).”

Validitas tes digunakan validitas isi yaitu dengan cara menyusun tes berdasarkan kisi-kisi tes pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas X. Sedangkan soal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari tes pilihan ganda yang terdiri dari 5 pilihan jawaban.

Adapun kisi-kisi tes dapat dilihat pada (lampiran 1 ). Sedangkan tes dengan kompetensi dasar “Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” sebanyak 35 butir pertanyaan dapat dilihat pada ( lampiran 2 ).

b. Skoring Tes

Jawaban benar diberi nilai 1

Jawaban salah diberi nilai 0

c. Uji Validitas Tes

Validitas yang digunakan adalah analisis butir yaitu mengkorelasikan butir yang dimaksud dengan total skor. Skor pada butir dipandang sebagai X dan skor total dipandang sebagai Y.

Untuk menguji korelasi antar skor baris butir dengan skor total menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$N$  : Banyaknya subjek

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi antara variabel x dan y

$X$  : Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item

$Y$  : Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

$\sum X$  : jumlah skor dalam distribusi x

$\sum Y$  : jumlah skor dalam distribusi y

$\sum XY$  : jumlah perkalian x dan y

Keputusan uji:

$r_{xy} \geq r_{\text{tabel}}$  item pertanyaan tersebut valid

$r_{xy} < r_{\text{tabel}}$  item pertanyaan tersebut tidak valid

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170).

d. Pernyataan Valid

Berdasarkan perhitungan, jika indeks konsistensi internal butir ke-i kurang dari 0,3 maka butir tersebut harus dibuang. Berlaku untuk sebaliknya, jika  $r_{xy} \geq 0,3$  maka butir tersebut dapat digunakan.

Dalam perhitungan uji coba tes tentang Variabel Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan datanya dapat dilihat pada (Lampiran 3 ).

Adapun contoh perhitungan dapat dilihat pada ( lampiran 4).  
Sedangkan hasil uji coba validitas dari tes tentang Variabel Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada (Lampiran 5 ).

e. Uji Reliabilitas

Budiyono (2003: 40) mengatakan, “Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada orang yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi yang sama) pada waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan.”

Dengan kata lain reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan suatu alat ukur. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika dapat dipercaya, konsisten atau stabil. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah suatu instrumen yang digunakan reliabel atau tidak diperlukan adanya uji reliabilitas.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan rumus KR-20 dan rumus Alpha. Rumus KR-20 digunakan untuk menguji reliabilitas dari tes pembelajaran PKn. Sedangkan rumus Alpha digunakan untuk menguji reliabilitas dari angket kesadaran hukum.

Rumus KR-20 berbentuk sebagai berikut :

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( \frac{s_t^2 - \sum p_i q_i}{s_t^2} \right)$$

Keterangan :

$n$  = banyaknya butir instrumen

$p_i$  = proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar pada butir ke-i

$q_i$  = proporsi banyaknya subyek yang menjawab salah pada butir ke-i

$$(q_i = 1 - p_i)$$

$$s_t^2 = \text{variansi total}$$

(Budiyono, 2003: 45)

Kategori indeks reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto (1998: 260) adalah sebagai berikut :

0,8 – 1	: Sangat tinggi
0,6 – 0,8	: Tinggi
0,4 – 0,6	: Cukup
0,2 – 0,4	: Rendah
0 - 0,2	: Sangat Rendah

Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan reliabel jika  $r_{11} \geq 0,7$ .

Rumus Alpha berbentuk sebagai berikut :

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right)$$

Keterangan :

$r_{11}$  = reliabilitas instrumen

$n$  = banyaknya butir instrumen

$s_i^2$  = variansi skor butir ke- $i$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots$

$st^2$  = variansi skor-skor yang diperoleh subyek uji coba

(Budiyo, 2003: 46)

f. Tahap Revisi

Instrumen yang telah diujicobakan direvisi dengan menghilangkan atau mengganti butir-butir instrumen yang tidak memenuhi syarat-syarat instrumen yang baik. Adapun Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut hanya terdiri dari 30 butir soal yang valid dari 35 butir soal. (Lampiran 6)

g. Penetapan Instrumen

Butir-butir instrumen yang memenuhi syarat-syarat instrumen yang baik ditetapkan sebagai instrumen penelitian.

2. Instrumen Angket/ Kuesioner

Sonny Sumarsono (2004: 81) menyatakan, “Daftar pertanyaan atau kuesioner diartikan sebagai suatu daftar tertulis yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal tertentu untuk dijawab secara tertulis.”

Sedangkan menurut Soeratno & Lincoln Arsyad (1995: 96) menyatakan, “Angket (kuesioner atau daftar pertanyaan) merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.”

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa angket/kuesioner adalah suatu daftar tertulis dengan memberikan daftar pertanyaan untuk diisi. Peneliti menggunakan teknik angket untuk mendapatkan data variabel terikat yaitu kesadaran hukum.

a. Macam-macam Angket/Kuesioner

Dalam suatu kuesioner dapat dibedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut pandangnya sebagai berikut:

1) Dipandang dari cara menjawab

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) bahwa, Kuesioner apabila dipandang dari cara menjawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- ”a) Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri.
- b) Kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.

## 2) Dipandang dari jawaban yang diberikan

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) bahwa, kuesioner apabila dipandang dari jawaban yang diberikan dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- ” a) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya.
- b) Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang lain.”

## 3) Dipandang dari bentuknya

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 129) bahwa, kuesioner apabila dipandang dari bentuknya dibedakan menjadi empat macam yaitu :

- a) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner tertutup.
- b) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka.
- c) *Check list*, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda *check* (✓) pada kolom yang sesuai.
- d) *Rating-scale* (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkat-tingkatan misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup secara langsung dengan tipe *check list* (✓) untuk variabel kesadaran hukum, maksudnya responden tinggal menjawab kuesioner karena sudah disediakan semua pertanyaan beserta jawaban yang telah ditentukan dan dibatasi dimana jawaban tersebut merupakan tanggapan langsung dari dirinya dengan membubuhkan tanda *check* (✓) pada kolom yang sesuai.

## b. Langkah-langkah penyusunan Angket/Kuesioner

### 1) Melakukan spesifikasi data-data sumber

Spesifikasi data dan sumbernya merupakan langkah awal dan utama sebelum penyusunan angket. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui aspek-aspek yang akan diukur dan siapa-siapa yang akan dijadikan responden. Adapun yang akan diukur adalah :

- a) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai variabel X
- b) Kesadaran hukum sebagai variabel Y

## 2) Menyusun angket

Langkah-langkah dalam menyusun angket, diantaranya sebagai berikut:

### a) Merumuskan tujuan

Sehubungan dengan masalah yang diteliti, maka angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media internet sebagai sumber pembelajaran PKn.

### b) Merumuskan variabel yang akan diukur.

Dengan konsep dasarnya yaitu kesadaran hukum.

### c) Merumuskan indikator/kisi-kisi angket

Dari variabel-variabel tersebut diatas dapat dirumuskan indikatornya, kemudian disusun butir angket berdasarkan indikator tersebut. (Lampiran 7).

### d) Menyusun butir angket.

Untuk angket media internet terdiri dari 35 soal, yang terdiri dari 17 item *favorable* (positif) pada nomor 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 30, 31, 32, 33 dan 18 item *unfavorable* (negatif) pada nomor 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, (Lampiran 8)

### e) Penentuan bobot nilai

Penilaian alternatif jawaban menggunakan angka 1 – 5, dilanjutkan dengan pemberian skor positif dan negatif.

Pemberian bobot pernyataan positif adalah :

<u>Alternatif jawaban</u>	<u>Bobot nilai</u>
sangat setuju	5
setuju	4
ragu-ragu	3
tidak setuju	2
sangat tidak setuju	1

Sedangkan bobot pernyataan negatif adalah :

Alternatif jawaban	<u>Bobot nilai</u>
sangat setuju	1
setuju	2
ragu-ragu	3
tidak setuju	4
sangat tidak setuju	5

(Sanafiah Faisal, 1981 : 38)

f) Uji coba Angket

Untuk mengetahui kelayakan instrumen dilakukan uji coba (*try out*). Sebelum angket digunakan sebagai alat ukur, maka angket tersebut perlu diujicobakan terlebih dahulu, karena hasil penelitian lebih banyak ditentukan oleh kualitas alat ukur yang digunakan.

Uji coba angket ini diberikan kepada 40 siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009 diluar sampel yang telah ditetapkan. Dengan maksud untuk mengetahui apakah angket tersebut sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sebagai instrumen pengumpul data.

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 158 ),”suatu alat maksud dari uji coba atau try out angket ini adalah menyebarkan angket yang telah disusun kepada sejumlah responden diluar sampel penelitian”. Tujuan dari uji coba angket ini adalah untuk menyempurnakan alat ukur sehingga diperoleh data yang memenuhi validitas dan reliabilitas.

1) Validitas

Validitas dilakukan guna mengetahui tingkat kesahihan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang ingin diukur yakni keadaan responden yang sebenarnya.

Saifuddin Azwar (2003: 173) menyatakan,”validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen suatu pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya.”

Selanjutnya Scarvia B. Anderson dalam Suharsimi Arikunto ( 2002 : 63 ) mengemukakan beberapa macam validitas antara lain :



- (a) Validitas isi (*content validity*), sebuah tes dikatakan memenuhi validitas isi jika mengukur tujuan khusus tentang yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu materi yang dianjurkan tertera dalam kurikulum maka validitas isi ini sering disebut juga validitas kurikulum.
- (b) Validitas konstruksi (*construct validity*). sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap bentuk berpikir seperti yang disebutkan dalam Tujuan Instruksional Khusus.
- (c) Validitas "ada sekarang", validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman.
- (d) Validitas prediksi (*predictive validity*), memprediksi artinya meramal. Dalam meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas validitas yang digunakan adalah validitas konstruksi dan dalam menguji validitas ini menggunakan rumus uji validitas menggunakan rumus korelasi dari Pearson dalam Saifuddin Azwar (2003: 48) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, atau antara skor tiap item dengan skor tiap responden

$\sum X$  = jumlah skor tiap item

$\sum Y$  = jumlah skor tiap responden

N = jumlah responden uji coba angket

Setelah dilakukan perhitungan hasilnya dikonsultasikan dengan kriteria validitas sebagai berikut :

Antara 0,800 – 1,000 = sangat tinggi

Antara 0,600 – 0,800 = tinggi

Antara 0,400 – 0,600 = cukup

Antara 0,200 – 0,400 = rendah

Antara 0,000 – 0,200 = sangat rendah

Dalam penelitian ini apabila validitas item dinyatakan sangat tinggi, tinggi dan sedang maka item diterima. Apabila validitas dinyatakan rendah dan sangat rendah maka item ditolak, dan dalam penelitian selanjutnya tidak dipakai.

Dalam perhitungan uji coba angket tentang Variabel kesadaran hukum datanya dapat dilihat pada (Lampiran 9 ).

Adapun contoh perhitungan dari uji coba validitas angket tentang kesadaran hukum dapat dilihat pada ( lampiran 10). Sedangkan hasil dari uji coba validitas angket tentang kesadaran hukum dapat dilihat pada ( lampiran 11).

Setelah diadakan uji coba angket tentang Variabel kesadaran hukum diperoleh data bahwa dari 35 daftar pertanyaan angket hanya 30 pertanyaan yang valid dan dapat dipergunakan untuk data penelitian selanjutnya. ( lampiran 12)

## 2) Reliabilitas

Angket dikatakan reliabilitas apabila angket tersebut mempunyai keajegan dalam mengukur apa yang diukurnya yaitu, apabila angket diberikan kepada subjek yang sama dalam waktu yang berbeda akan mendapatkan hasil yang relatif sama untuk menguji reliabilitas angket. Penulis menggunakan teknik belah dua Spearman Brown dengan mengkorelasikan nilai validitas nomor item ganjil dengan genap.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \frac{r_{\frac{11}{22}}}{1 + r_{\frac{11}{22}}}$$

Keterangan :

$r_{11}$  : koefesien korelasi reliabilitas

$r_{1/2}$  : koefesien korelasi bilangan ganjil dan genap

Dari hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan pada taraf signifikasi 5% jika  $r_{\text{tabel}} > r_{\text{hit}}$  maka item pertanyaan angket tersebut reliabel. Jika  $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hit}}$  maka angket tersebut tidak reliabel. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada ( lampiran 13).

## **E. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Prasvarat Analisis**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data yang diperoleh menyimpang atau tidak dari asumsi normalitas.

Uji normalitas digunakan dengan cara menggunakan rumus Liliefors, langkahnya sebagai berikut :

$$1) z_1 = \frac{(X_i - X)}{s}$$

= angka baku

$X$  = data  $X$

$$= \frac{X_1}{N}$$

$S$  = simpangan baku

2) Tiap angka baku menggunakan distribusi normal baku

Menghitung peluang  $F(Z_i) = P ( Z \geq Z_i )$

$$3) S (Z_i) = \frac{\text{banyaknya } Z_1 Z_2 \dots Z_n}{n}$$

4) Menghitung selisih  $F (Z_i - S(Z_i))$  kemudian harga mutlaknya.

5) Mencari nilai yang terbesar dari selisih tersebut menjadi  $L_{\text{hitung}} / L_{\text{hit}}$

6) kesimpulannya

Jika  $L_{\text{hit}} > L_{\text{tabel}}$  atau  $L_{\text{kritis}}$  tolak hipotesis statistik jadi tidak normal

Jika  $L_{\text{hit}} < L_{\text{tabel}}$  tolak hipotesis statistik jadi normal

#### **b. Uji Linieritas**

$$1) JK_{(T)} = \sum Y^2$$

$$\begin{aligned}
2) \quad JK(a) &= \frac{(\sum Y)^2}{N} \\
3) \quad JK(a) &= \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \\
4) \quad JK(b/a) &= b \left[ \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N} \right] \\
5) \quad JK(S) &= JK(T) - JK(a) - JK(b/a) \\
6) \quad JK(G) &= \sum \left\{ \sum Y - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\} \\
7) \quad JK(TC) &= JK(S) - JK(G)
\end{aligned}$$

c. Uji Independensi

Uji independensi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Korelasi *Product Moment*:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana:

$N$  : Banyaknya subjek

$r_{XY}$  : Koefesien korelasi antara variabel x dan y

$X$  : Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item

$Y$  : Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

$\sum X$  : jumlah skor dalam distribusi x

$\sum Y$  : jumlah skor dalam distribusi y

$\sum_{XY}$  : jumlah perkalian x dan y

Keputusan uji:

$P > 0,05$  maka variabel bebas (X) independen.

## 2. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah :

“Menurut Pearson untuk mencari hubungan dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi sederhana rumus korelasi moment tangkar.”  
(Sutrisno Hadi, 1995 : 4)

Rumus korelasi moment tangkar adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Hasilnya kemudian dikonsultasikan dengan tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N. Jika  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  berarti antara X dan Y ada hubungan, namun jika  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$  maka antara X dan Y tidak ada hubungan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Deskripsi Data**

Berdasarkan masalah penelitian yang berjudul HUBUNGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009, dibutuhkan data sebagai berikut :

1. Data tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai variabel bebas (X)
2. Data tentang Kesadaran Hukum sebagai variabel terikat (Y)

Data-data tersebut diatas dikumpulkan dengan menggunakan teknik komunikasi tak langsung dengan instrumen tes dan angket, karena kedua data tersebut merupakan data interval yang perlu pengukuran sehingga dapat

dikorelasikan. Selanjutnya akan dijabarkan satu persatu data tersebut sebagai berikut :

### 1. Deskripsi Data Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

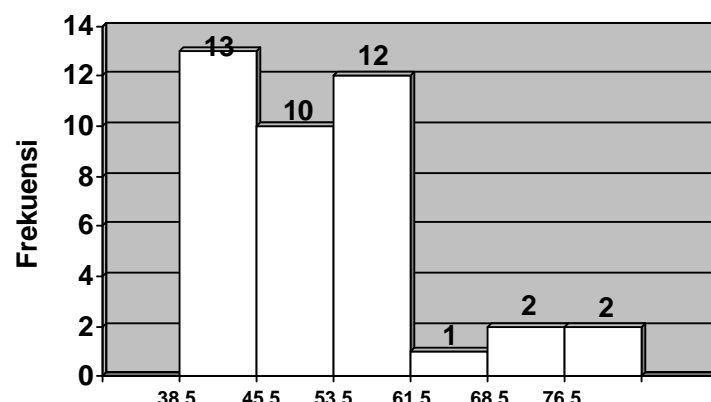
Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui jumlah responden (N)=40, Nilai tertinggi= 85, Nilai terendah = 38, Mean= 52,25. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam (lampiran 14). Untuk mendapatkan kelas interval, terlebih dahulu dicari interval (R) diperoleh dari perhitungan  $R = \text{data max} - \text{data min}$  hasilnya adalah 47.

Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus  $K = 1 + 3,3 \times \log N$  (40) hasilnya 6,714 dapat dibulatkan menjadi 7. Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus  $I = R/K$  hasilnya adalah 6,685 dapat dibulatkan menjadi 7. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Distribusi frekuensi nilai Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas interval	Frekuensi (F)	Prosentase	Prosentase Kumulatif
38-45	13	32,5%	32,5%
46-53	10	25%	57,5%
54-61	12	30%	87,5%
62-69	1	2,5%	90%
70-77	2	5%	95%
78-85	2	5%	100%
Jumlah	40	100%	-

Dari data yang tercantum pada tabel 4 diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk Histogram sebagai berikut :



Gambar 2. Histogram Pembelajaran PKn

## 2. Deskripsi Data tentang Kesadaran Hukum

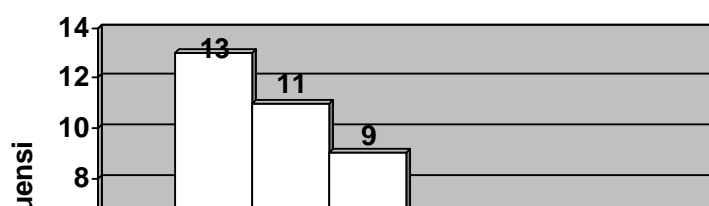
Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui jumlah responden (N)=40, Nilai tertinggi= 83, Nilai terendah = 39, Mean= 53,2. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam (lampiran 14). Untuk mendapatkan kelas interval, terlebih dahulu dicari interval (R) diperoleh dari perhitungan  $R = \text{data max} - \text{data min}$  hasilnya adalah 44.

Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus  $K = 1 + 3,3 \times \log N$  (40) hasilnya 6,587 dapat dibulatkan menjadi 7. Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus  $I = R/K$  hasilnya adalah 6,685 dapat dibulatkan menjadi 7. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Nilai Kesadaran Hukum

Kelas interval	Frekuensi (F)	Prosentase	Prosentase Komulatif
39-46	13	32,5%	32,5%
47-54	11	27,5%	60%
55-62	9	22,5%	82,5%
63-70	4	10%	92,5%
71-78	1	2,5%	95%
79-86	2	5%	100%
Jumlah	40	100%	-

Dari data yang tercantum pada tabel 5 diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk Histogram sebagai berikut :



Gambar 3. Histogram Kesadaran Hukum

## B. Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa uji persyaratan teknik Analisis Statistik yang harus dipenuhi yaitu, syarat uji normalitas dengan menggunakan rumus Lilliefors, uji Linieritas dengan menggunakan regresi linier.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis mempunyai sebaran yang normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji *Lilliefors*. Berdasarkan hasil uji diperoleh data sebagai berikut:

#### a. Variabel Pembelajaran PKn

Uji persyaratan normalitas nilai pembelajaran PKn dengan menggunakan uji liliefors diperoleh hasil, dengan  $N=40$  diperoleh  $L_o=0,1449$  dan pada taraf signifikansi 5%,  $L_{tabel}=0,1537$ . Karena harga  $L_o > L_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai pembelajaran PKn adalah normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada (lampiran 15).

#### b. Variabel Kesadaran Hukum

Uji persyaratan normalitas nilai Kesadaran Hukum dengan menggunakan uji liliefors diperoleh hasil, dengan  $N=40$  diperoleh  $L_o=0,1449$  dan pada taraf signifikansi 5%,  $L_{tabel}=0,1537$ . Karena harga  $L_o > L_{tabel}$ , maka



dapat disimpulkan bahwa nilai pembelajaran PKn adalah normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada (lampiran 16).

## 2. Uji Linieritas

Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji linieritas X terhadap Y adalah membuat tabel kerja linieritas seperti yang terlampir pada (lampiran 17). Setelah itu dilakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

- a.  $JK(T) = 728176$
- b.  $JK(A) = 2954,05$
- c.  $JK(B/A) = 1528,38$
- d.  $JK(S) = 2379,41$
- e.  $JK(G) = 1190,33$
- f.  $JK(TC) = 1169,66$
- g.  $dk(TC) = 24$
- h.  $dk(G) = 24$
- i.  $RJK(TC) = 49,55$
- j.  $F_{hit} = 1,00$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas menunjukkan bahwa  $F_{hit} < F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% atau  $1,00 < 1,98$ . Maka dapat diambil kesimpulan bahwa X linier terhadap Y. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada (lampiran 17).

## 3. Uji Indepedensi

Uji independensi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka tidak ada hubungan antara X dengan Y. Akan tetapi jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka antar variabel terdapat suatu hubungan. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Korelasi Product Moment. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai  $r_{xy} = 0.4033$ . Hasil tersebut dikonsulasikan dengan nilai  $r_{tabel}$  dengan  $N = 40$  dan taraf signifikansi 5 % sebesar 0.287. Karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti Pembelajaran Siswa (X) mempunyai korelasi dengan Kesadaran hukum (Y). Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada (Lampiran 18).

## C. Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka digunakan teknik analisa regresi. Dalam penelitian ini perumusan pengujian menggunakan hipotesis kerja. Mengartikan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009.

Sedangkan keberartian atau signifikansi dibuktikan dengan harga  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $1,58 < 2,968$ . Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis yang berbunyi : hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura. Dapat dilihat dari hasil perhitungan pada (lampiran 19).

Dalam persamaan garis regresi linier (lampiran 20) adalah sebagai berikut :

$$Y = 108.8579 + 1.0174$$

$$r_{xy} = 0,648$$

$$r_{tabel} = 0,297$$

$$t_{tabel} = 2,968$$

Berdasarkan pengujian hipotesis dan perhitungan analisis data dapat diketahui dengan perolehan  $r_{xy}$  sebesar 0,648. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai  $r_{tabel}$  dengan  $N=40$  product moment person dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0.287. Maka  $r_{xy} > r_{tabel}$  atau  $0.4033 > 0.287$ . Berarti ada hubungan antara X dengan Y.

#### **D. Pembahasan Hasil Analisis Data**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum. Hal ini dari hasil pengujian hipotesis korelasi antara pembelajaran PKn (X) dengan kesadaran hukum (Y) diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,4033. Setelah dikonsultasikan dengan  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh harga  $r_{tabel} = 0,297$ , maka  $r_{xy}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  atau  $0,4033 > 0,297$  dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan antara pembelajaran PKn dengan kesadaran hukum sebesar 0,4033. Jadi semakin tinggi pengaruh pembelajaran PKn maka semakin tinggi pula kesadaran hukum siswa demikian pula sebaliknya jika semakin rendah pengaruh pembelajaran PKn maka semakin rendah pula kesadaran hukum siswa.

Dari hasil perhitungan  $r_{xy}$  sebesar 0,4033 didapat nilai sumbangan efektif sebesar 16,87%. dengan demikian variabel pembelajaran PKn memberikan kontribusi pada variabel kesadaran hukum siswa sebesar 16,87%. Jadi pembelajaran PKn mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum siswa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009 dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009.

Adanya kesimpulan tersebut dibuktikan dengan besarnya  $r_{xy}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  atau  $0.403 > 0.287$  dari analisa data diperoleh nilai  $t$  sebesar 2.968. Besarnya hubungan menunjukkan keterangan bahwa variabel pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai pengaruh yang positif atau kuat terhadap variabel kesadaran hukum siswa. Sedangkan signifikansi atau keberartian hubungan variabel tersebut dibuktikan dengan harga  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $2.968 > 1.58$ . Mengenai tinggi rendahnya kesadaran hukum siswa dapat diprediksi melalui persamaan  $Y = 108.8579 + 1.0174X$

Persamaan regresi yang dapat menggambarkan bahwa apabila ada perubahan satu unit atau adanya kenaikan satu angka pada variabel pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membawa perubahan sebesar 1.0174 pada kesadaran hukum pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut :

##### 1. Implikasi Teoritis

Karena pembelajaran PKn mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kesadaran hukum, maka pembelajaran PKn merupakan media pengajaran yang efektif untuk membangun kesadaran hukum.

##### 2. Implikasi Praktis

Karena pembelajaran PKn mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kesadaran hukum, maka materi pembelajaran PKn harus diajarkan oleh guru kepada siswa secara intensif melalui Kegiatan Belajar Mengajar.

### **C. Saran**

Sesuai dengan hasil kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, maka peneliti dapat kemukakan saran-saran sebagai berikut :

#### **1. Bagi Siswa**

Kesadaran hukum hendaknya ditanamkan sejak dini kepada siswa melalui pembelajaran PKn.

#### **2. Bagi Guru**

Pembelajaran PKn sangat berperan penting dalam membangun kesadaran hukum siswa oleh karena itu hendaknya guru secara intensif memberikan pemahaman materi PKn secara luas dan mendalam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmawi Zainul. 1995. Penilaian Hasil Belajar. Jakarta : Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
- AW Widjaja. 1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Palembang : CV Era Swasta.
- Bambang Prasetyo & Lina Mifathul Jannah. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Budiyono. 2003. Metodologi Pendidikan Nasional. Surakarta : UNS Press.
- Chairuddin O.K. 1991. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eric. 1996. *Journal International of Definition Civic Education as Subject*,  
<http://www.Geogle.com>.
- E. Mulyasa. 2005. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2000. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ilhami Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Larry Bimi. 2009. *Journal Internasional of Definition Civic Education as Subject*,  
[http// www. Wikipedia. com](http://www.Wikipedia.com).
- Saifuddin Azwar. 2007. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanafiah Faisal. 1981. Dasar dan Teknik Menyusun Angket. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sevilla, Consuelo G et al. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Penerjemah: Alimuddin Tuwu. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soedomo Hadi. 2003. Media Pembelajaran. Jakarta : CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto . 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 1983. Beberapa Aspek Sosial Yuridis dalam Masyarakat. Bandung : Alumni.
- Soeratno & Lincoln Arsyad. 1995. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Soetardi, 1990. Bimbingan Penulisan Skripsi. Surakarta : UNS Press.
- Sonny Sumarsono. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suharsimi Arikunto. 1998. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bima Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. 1995. Statistik. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Syahrial Syarbaini.Dkk. 2006. Membangun Karakter Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S. Sumarsono ET AL.2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia.
- Tim Penyusun Kamus P3B. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2. Jakarta : Balai Pustaka.
- Winarno. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: UNS Press.
- Winarno Surakhmad .1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik. Bandung : Tarsito.
- \_\_\_\_\_. 1998. Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: dasar, metode dan teknik. Bandung: Tarsito.

#### Lampiran 1

##### Kisi-kisi Tes Pembelajaran PKn

No.	Variabel	Konsep	Indikator	Item
-----	----------	--------	-----------	------

1.	Pendidikan Kewarganegaraan	Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	1. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. 2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 3. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku.	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24,25  26,27,28,29, 30,31,32,33, 34,35
----	----------------------------	--	--	---

## Lampiran 2

### Tes Uji Coba Penelitian

#### SURAT PENGANTAR

Dengan hormat,  
 Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan  
 Ilmu Pengetahuan Sosial Program PKn Universitas Sebelas Maret Surakarta  
 sedang mengadakan penelitian tentang :  
**HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  
 KEWARGANEGARAAN DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS**

X SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009

Untuk itu kami mohon kesediaan adik-adik untuk mengisi tes yang kami ajukan ini.

Kami mohon adik-adik dalam mengisi angket ini sebagaimana nyatanya, karena informasi yang adik-adik berikan dapat membantu kerja ilmiah kami. Dan atas bantuan adik-adik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Solo, Mei 2009

Indra Setyo N.  
K 6404035

### **TES PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Petunjuk cara pengisian

1. Isilah identitas anda terlebih dahulu.
2. Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda silang (X) sesuai dengan pilihan.
3. Selamat mengerjakan.

Identifikasi responden

- 3) Nama :
- 4) Kelas :

1. Himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat adalah...

- A. Hukum
- B. Nilai
- C. Norma
- D. Ilmu
- E. Adat

2. Salah satu sifat dalam hukum ialah...

- A. Menekan



- B. Memaksa
- C. Mengekang
- D. Mengikat
- E. Memberatkan

3. Secara umum fungsi hukum bertujuan menciptakan...
  - A. Keadilan sosial bagi masyarakat
  - B. Kesejahteraan bagi masyarakat
  - C. Ketertiban dan kesejahteraan
  - D. Keamanan masyarakat dari ancaman
  - E. Kedisiplinan terhadap rakyat
4. Yang bukan penggolongan hukum menurut sumbernya ialah...
  - A. H. Adat
  - B. H. Traktat
  - C. H. Ilmu
  - D. H. Formal
  - E. H. Yurisprudensi
5. Yang termasuk dari hukum publik, kecuali...
  - A. H. Tata negara
  - B. H. Pidana
  - C. H. Internasiona
  - D. H. Pajak
  - E. H. Perdata
6. Salah satu hukum berdasarkan wujudnya adalah...
  - A. H. Subjektif
  - B. H. Adat
  - C. H. Formal
  - D. H. material
  - E. H. Nasional
7. Hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang beserta sanksinya merupakan definisi dari ...
  - A. H. Pidana
  - B. H. nasional

- C. H. Adat
  - D. H. Formal
  - E. H. Traktat
8. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi merupakan pendapat dari...
- A. Utrecht
  - B. SM Amin
  - C. Leon duquit
  - D. MH Tirta Atmadja
  - E. JCT Simorangkir
9. Beberapa unsur dari hukum ialah, kecuali ...
- A. Mengatur tingkah laku manusia
  - B. Dibuat oleh badan berwajib
  - C. Sanksinya bersifat tegas
  - D. Bersifat memaksa
  - E. Bersifat mengikat
10. Membunuh merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam ...
- A. KUH Perdata
  - B. KUH Pidana
  - C. H. Adat
  - D. H. Waris
  - E. H. Dagang
11. Badan Negara yang berwenang memeberantas korupsi adalah...
- A. LSM
  - B. MA
  - C. KPK
  - D. Komnas HAM
  - E. Pengadilan Tinggi

12. Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam UUD'45 yaitu pasal...
  - A. 27 ayat 1
  - B. 27 ayat 2
  - C. 28 ayat 2
  - D. 30 ayat 1
  - E. 30 ayat 2
13. Macam pidana pokok menurut Pasal 10 KUH Pidana adalah...
  - A. Pidana mati
  - B. Pidana penjara
  - C. Pidana kurungan
  - D. Pidana denda
  - E. Pidana bersyarat
14. Salah satu perilaku siswa yang dilarang dalam tata tertib sekolah ialah...
  - A. Belajar
  - B. Diskusi
  - C. Berkelahi
  - D. Mengejakan PR
  - E. Membersihkan kela
15. Dengan mengikuti upacara bendera tiap minggu merupakan perwujudan dari...
  - A. Sadar hukum
  - B. Disiplin
  - C. Tenggang rasa
  - D. Toleransi
  - E. Anarkis
16. Bentuk perbuatan siswa yang harus dihindari, kecuali...
  - A. Mencuri
  - B. Berkelahi
  - C. Merokok

- D. Belajar
  - E. Membolos
17. Yang harus dilakukan siswa ketika ada jam pelajaran kosong adalah...
- A. Jajan di kantin
  - B. Berbuat gaduh
  - C. Bermain handphone
  - D. Mengerjakan tugas
  - E. Mengobrol
18. Bentuk sanksi bila melanggar tata tertib sekolah, kecuali...
- A. Hukuman
  - B. Skorsing
  - C. Penghargaan
  - D. Teguran keras
  - E. Pemanggilan orang tua
19. Kewajiban sebagai siswa bila akan menghadapi ujian adalah...
- A. Bermain
  - B. Belajar
  - C. Berjudi
  - D. Membuat contekan
  - E. Membolos
20. Perbuatan siswa yang dilarang bila mengikuti ujian adalah...
- A. Tenang mengerjakan
  - B. Berbuat gaduh
  - C. Menyontek
  - D. Bekerja sama dengan teman
  - E. Tidur di kelas
21. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kecuali...
- A. Gotong royong
  - B. Acuh

- C. Tegang rasa
  - D. Toleransi
  - E. Melanggar norma
22. Sikap kita bila mengetahui teman sedang berkelahi adalah...
- A. Menonton
  - B. Mendukung
  - C. Melerai
  - D. Acuh saja
  - E. Ikut membantu
23. Yang wajib dilakukan saat berkendara motor di jalan raya, kecuali...
- A. Mengemudi ugal-ugalan
  - B. Memakai helm
  - C. Mentaati rambu lalu-lintas
  - D. Tidak menerobos lampu merah
  - E. Membawa surat kelengkapan motor
24. Kesadaran hukum dalam masyarakat akan terjadi apabila...
- A. Dilakukan sosialisasi dalam penegakan hukum
  - B. Dilakukan penegakan hukum secara tebang pilih
  - C. Banyaknya aturan di masyarakat
  - D. Adanya denda yang besar bagi pelanggar hukum
  - E. Adanya hak kesederajatan di depan hukum
25. Solusi yang tepat bila sesama individu terjadi masalah adalah...
- A. Berdamai
  - B. Musyawarah
  - C. Jalur hukum
  - D. Bertengkar
  - E. Mediasi
26. Salah satu bentuk ketaatan hukum ialah, kecuali...
- A. Membayar pajak tepat waktu

- B. Saling menghormati
  - C. Melanggar norma
  - D. Menjaga keamanan lingkungan
  - E. Mendengar nasihat orang tua
27. Dalam kehidupan hukum sangat diperlukan karena...
- A. Adanya perbedaan kebutuhan
  - B. SARA yang beragam
  - C. Sanksi yang tegas & memaksa
  - D. Penduduk yang banyak
  - E. Bermanfaat untuk semua
28. Sikap warga negara yang baik terhadap hukum yang berlaku adalah...
- A. Terpaksa
  - B. Acuh
  - C. Tidak patuh
  - D. Mentaati
  - E. Melanggar
29. Apakah dampak bila masyarakat tidak mentaati hukum...
- A. Meningkatnya kejahatan
  - B. Kehidupan tenteram
  - C. Rakyat sejahtera
  - D. Kemanan terkendali
  - E. Kerukunan terjamin
30. Penegakan kebenaran dalam hukum di masyarakat tampak apabila...
- A. Saling menyayangi
  - B. Tidak sewenang-wenang kepada orang lain
  - C. Tengang rasa kepada teman saja
  - D. Hanya menghormati orang kaya
  - E. Taat peraturan yang menguntungkan saja

31. Lembaga hukum negara tempat untuk mengajukan kasasi dan garasi adalah...
- A. Pengadilan Negeri
  - B. Pengadilan Tata Usaha Negara
  - C. Pengadilan Agama
  - D. Mahkamah Agung
  - E. Kejaksaan
32. UU No.31 Thn. 1999 adalah peraturan yang mengatur tindak kejahatan...
- A. Makar
  - B. Penipuan
  - C. Pencurian
  - D. Pembunuhan
  - E. Korupsi
33. Sikap kita sebagai generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi adalah...
- A. Mendukung
  - B. Acuh saja
  - C. Memasyarakatkan
  - D. Ikut mensosilisaikan
  - E. Penanaman sejak dini
34. Istilah lain dari penegakan hukum yang digunakan oleh aparat adalah...
- A. *The rule of law*
  - B. *Supremacy of law*
  - C. *Law of goodverment*
  - D. *Law enforcement*
  - E. *Law statment*
35. Pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menurut Undang-Undang adalah...
- A. Hakim
  - B. Jaksa
  - C. Polisi
  - D. Pengacara
  - E. Saksi



## Lampiran 3





## Lampiran 4

**Contoh Perhitungan Uji Validitas Hasil Uji Coba Variabel  
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

**Item No. 1**

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N (\sum y)^2]}} \\
 &= \frac{(40 \times 788) - 27 \times 1123}{\sqrt{[(40 \times 729) - (27)^2][40 - (1123)^2]}} \\
 &= \frac{31520 - 30321}{\sqrt{(29160 - 729)(1298680) - 1261129}} \\
 &= \frac{1199}{39567} \\
 &= 0,330
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh r-hitung sebesar 0,330. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan r-tabel pada tingkat signifikasi 5% dan n= 40 dan diperoleh hasil sebesar 0,3. Karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0,330 > 0,3$  maka item pernyataan tersebut **Valid**.

Untuk perhitungan validitas no. 2-35 menggunakan cara yang sama.

## Lampiran 5

**Hasil Uji Validitas Variabel Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

No. Item	Analisis	Rhitung	Rtabel	Keterangan
VAR0001	Pearson Correlation	.330	0.3	<b>Valid</b>
VAR0002	Pearson Correlation	.379	0.3	<b>Valid</b>
VAR0003	Pearson Correlation	.382	0.3	<b>Valid</b>
VAR0004	Pearson Correlation	.216	0.3	<b>Tidak Valid</b>

VAR0005	Pearson Correlation	.314	0.3	<b>Valid</b>
VAR0006	Pearson Correlation	.280	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0007	Pearson Correlation	.390	0.3	<b>Valid</b>
VAR0008	Pearson Correlation	.167	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0009	Pearson Correlation	.336	0.3	<b>Valid</b>
VAR0010	Pearson Correlation	.411	0.3	<b>Valid</b>
VAR0011	Pearson Correlation	.379	0.3	<b>Valid</b>
VAR0012	Pearson Correlation	.548	0.3	<b>Valid</b>
VAR0013	Pearson Correlation	.534	0.3	<b>Valid</b>
VAR0014	Pearson Correlation	.389	0.3	<b>Valid</b>
VAR0015	Pearson Correlation	.146	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0016	Pearson Correlation	.536	0.3	<b>Valid</b>
VAR0017	Pearson Correlation	.922	0.3	<b>Valid</b>
VAR0018	Pearson Correlation	.495	0.3	<b>Valid</b>
VAR0019	Pearson Correlation	.435	0.3	<b>Valid</b>
VAR0020	Pearson Correlation	.324	0.3	<b>Valid</b>
VAR0021	Pearson Correlation	.387	0.3	<b>Valid</b>
VAR0022	Pearson Correlation	.435	0.3	<b>Valid</b>
VAR0023	Pearson Correlation	.308	0.3	<b>Valid</b>
VAR0024	Pearson Correlation	.590	0.3	<b>Valid</b>
VAR0025	Pearson Correlation	.366	0.3	<b>Valid</b>
VAR0026	Pearson Correlation	.314	0.3	<b>Valid</b>
VAR0027	Pearson Correlation	.187	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0028	Pearson Correlation	.314	0.3	<b>Valid</b>
VAR0029	Pearson Correlation	.302	0.3	<b>Valid</b>
VAR0030	Pearson Correlation	.645	0.3	<b>Valid</b>
VAR0031	Pearson Correlation	.509	0.3	<b>Valid</b>
VAR0032	Pearson Correlation	.376	0.3	<b>Valid</b>
VAR0033	Pearson Correlation	.308	0.3	<b>Valid</b>
VAR0034	Pearson Correlation	.497	0.3	<b>Valid</b>
VAR0035	Pearson Correlation	.556	0.3	<b>Valid</b>
Sig. (2-tailed)				
N		40		

Berdasarkan hasil uji coba validitas dengan menggunakan rumus *product moment* dari Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program Statistik SPSS dapat diketahui bahwa arti pernyataan, 30 dinyatakan valid karena  $R_{hitung} > R_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% dan  $N=40$  dengan nilai kritis 0,3 sedang 5 (4,6,8,15,27) dinyatakan invalid dan untuk penelitian selanjutnya dibuang.

Lampiran 6

**Tes Penelitian**  
**SURAT PENGANTAR**

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program PKn Universitas Sebelas Maret Surakarta sedang mengadakan penelitian tentang :

HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS  
X SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009

Untuk itu kami mohon kesediaan adik-adik untuk mengisi angket yang

kami ajukan ini.

Kami mohon adik-adik dalam mengisi angket ini sebagaimana nyatanya, karena informasi yang adik-adik berikan dapat membantu kerja ilmiah kami. Dan atas bantuan adik-adik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Solo, Mei 2009

Indra Setyo N.  
K 6404035

### **TES PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Petunjuk cara pengisian

1. Isilah identitas anda terlebih dahulu.
2. Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda silang (X) sesuai dengan pilihan.
3. Selamat mengerjakan.

Identifikasi responden

1. Nama :
2. Kelas :

1. Himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat adalah...

- A. Hukum
- B. Nilai
- C. Norma
- D. Ilmu

E. Adat

2. Salah satu sifat dalam hukum ialah...

A. Menekan

B. Memaksa

C. Mengekang

D. Mengikat

E. Memberatkan



3. Secara umum fungsi hukum bertujuan menciptakan...
  - A. Keadilan sosial bagi masyarakat
  - B. Kesejahteraan bagi masyarakat
  - C. Ketertiban dan kesejahteraan
  - D. Keamanan masyarakat dari ancaman
  - E. Kedisiplinan terhadap rakyat
4. Yang termasuk dari hukum publik, kecuali...
  - A. H. Tata negara
  - B. H. Pidana
  - C. H. Internasiona
  - D. H. Pajak
  - E. H. Perdata
5. Hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang beserta sanksinya merupakan definisi dari ...
  - A. H. Pidana
  - B. H. nasional
  - C. H. Adat
  - D. H. Formal
  - E. H. Traktat
6. Beberapa unsur dari hukum ialah, kecuali ...
  - A. Mengatur tingkah laku manusia
  - B. Dibuat oleh badan berwajib
  - C. Sanksinya bersifat tegas
  - D. Bersifat memaksa
  - E. Bersifat mengikat
7. Membunuh merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam ...
  - A. KUH Perdata

- B. KUH Pidana
  - C. H. Adat
  - D. H. Waris
  - E. H. Dagang
8. Badan Negara yang berwenang memeberantas korupsi adalah...
- A. LSM
  - B. MA
  - C. KPK
  - D. Komnas HAM
  - E. Pengadilan Tinggi
9. Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam UUD'45 yaitu pasal...
- A. 27 ayat 1
  - B. 27 ayat 2
  - C. 28 ayat 2
  - D. 30 ayat 1
  - E. 30 ayat 2
10. Macam pidana pokok menurut Pasal 10 KUH Pidana adalah...
- A. Pidana mati
  - B. Pidana penjara
  - C. Pidana kurungan
  - D. Pidana denda
  - E. Pidana bersyarat
11. Salah satu perilaku siswa yang dilarang dalam tata tertib sekolah ialah...
- A. Belajar
  - B. Diskusi
  - C. Berkelahi
  - D. Mengejakan PR
  - E. Membersihkan kela

12. Bentuk perbuatan siswa yang harus dihindari, kecuali...
  - A. Mencuri
  - B. Berkelahi
  - C. Merokok
  - D. Belajar
  - E. Membolos
13. Yang harus dilakukan siswa ketika ada jam pelajaran kosong adalah...
  - A. Jajan di kantin
  - B. Berbuat gaduh
  - C. Bermain handphone
  - D. Mengerjakan tugas
  - E. Mengobrol
14. Bentuk sanksi bila melanggar tata tertib sekolah, kecuali...
  - A. Hukuman
  - B. Skorsing
  - C. Penghargaan
  - D. Teguran keras
  - E. Pemanggilan orang tua
15. Kewajiban sebagai siswa bila akan menghadapi ujian adalah...
  - A. Bermain
  - B. Belajar
  - C. Berjudi
  - D. Membuat contekan
  - E. Membolos
16. Perbuatan siswa yang dilarang bila mengikuti ujian adalah...
  - A. Tenang mengerjakan
  - B. Berbuat gaduh
  - C. Menyontek
  - D. Bekerja sama dengan teman

- E. Tidur di kelas
17. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kecuali...
- A. Gotong royong
  - B. Acuh
  - C. Tenggang rasa
  - D. Toleransi
  - E. Melanggar norma
18. Sikap kita bila mengetahui teman sedang berkelahi adalah...
- A. Menonton
  - B. Mendukung
  - C. Melerai
  - D. Acuh saja
  - E. Ikut membantu
19. Yang wajib dilakukan saat berkendara motor di jalan raya, kecuali...
- A. Mengemudi ugal-ugalan
  - B. Memakai helm
  - C. Mentaati rambu lalu-lintas
  - D. Tidak menerobos lampu merah
  - E. Membawa surat kelengkapan motor
20. Kesadaran hukum dalam masyarakat akan terjadi apabila...
- A. Dilakukan sosialisasi dalam penegakan hukum
  - B. Dilakukan penegakan hukum secara tebang pilih
  - C. Banyaknya aturan di masyarakat
  - D. Adanya denda yang besar bagi pelanggar hukum
  - E. Adanya hak kesederajatan di depan hukum
21. Solusi yang tepat bila sesama individu terjadi masalah adalah...
- A. Berdamai
  - B. Musyawarah
  - C. Jalur hukum

- D. Bertengkar
  - E. Mediasi
22. Salah satu bentuk ketaatan hukum ialah, kecuali...
- A. Membayar pajak tepat waktu
  - B. Saling menghormati
  - C. Melanggar norma
  - D. Menjaga keamanan lingkungan
  - E. Mendengar nasihat orang
23. Sikap warga negara yang baik terhadap hukum yang berlaku adalah...
- A. Terpaksa
  - B. Acuh
  - C. Tidak patuh
  - D. Mentaati
  - E. Melanggar
24. Apakah dampak bila masyarakat tidak mentaati hukum...
- A. Meningkatnya kejahatan
  - B. Kehidupan tenteram
  - C. Rakyat sejahtera
  - D. Kemanan terkendali
  - E. Kerukunan terjamin
25. Penegakan kebenaran dalam hukum di masyarakat tampak apabila...
- A. Saling menyayangi
  - B. Tidak sewenang-wenang kepada orang lain
  - C. Tengang rasa kepada teman saja
  - D. Hanya menghormati orang kaya
  - E. Taat peraturan yang menguntungkan saja
26. Lembaga hukum negara tempat untuk mengajukan kasasi dan garasi adalah...

- A. Pengadilan Negeri
  - B. Pengadilan Tata Usaha Negara
  - C. Pengadilan Agama
  - D. Mahkamah Agung
  - E. Kejaksaan
27. UU No.31 Thn. 1999 adalah peraturan yang mengatur tindak kejahatan...
- A. Makar
  - B. Penipuan
  - C. Pencurian
  - D. Pembunuhan
  - E. Korupsi
28. Sikap kita sebagai generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi adalah...
- A. Mendukung
  - B. Acuh saja
  - C. Memasyarakatkan
  - D. Ikut mensosilisaikan
  - E. Penanaman sejak dini
29. Istilah lain dari penegakan hukum yang digunakan oleh aparat adalah...
- A. *The rule of law*
  - B. *Supremacy of law*
  - C. *Law of goodverment*
  - D. *Law enforcement*
  - E. *Law statment*
30. Pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menurut Undang-Undang adalah...
- A. Hakim
  - B. Jaksa
  - C. Polisi
  - D. Pengacara
  - E. Saksi

## Lampiran 7

**Kisi-kisi Angket Kesadaran Hukum**

	Variabel	Konsep	Indikator	No. Item	
				+	-
	Kesadaran hukum	Kesadaran hukum ialah perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.	1. Pengetahuan hukum 2. Pemahaman hukum 3. Sikap dan Perilaku hukum	1,2,3,7  8,10,11,  15,17,18,19,22 24,30,31,32,33	4,5,6

## Lampiran 8

**Angket Uji Coba Penelitian**  
**SURAT PENGANTAR**

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program PKn Universitas Sebelas Maret Surakarta sedang mengadakan penelitian tentang :

**HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009**

Untuk itu kami mohon kesediaan adik-adik untuk mengisi angket yang kami ajukan ini.

Kami mohon adik-adik dalam mengisi angket ini sebagaimana nyatanya, karena informasi yang adik-adik berikan dapat membantu kerja ilmiah kami. Dan atas bantuan adik-adik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Solo, Mei 2009

Indra Setyo N.  
K 640403

### **ANGKET KESADARAN HUKUM**

Petunjuk cara pengisian

- A. Isilah identitas anda terlebih dahulu.
  - B. Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda conteng ( ) sesuai dengan pilihan.
- 5) Selamat mengerjakan.

No.	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya merasa bersalah bila melanggar tata tertib sekolah.					
2.	Saya akan mengingatkan teman bila ada yang melanggar tata tertib sekolah.					
3.	Saya akan melaporkan apabila ada teman yang					



	membawa <i>handphone</i> ke sekolah.					
4.	Saya acuh bila melihat teman merokok di kantin sekolah.					
5.	Saya tidak peduli diberlakukannya tata tertib di sekolah.					
6.	Saya akan membolos bila ada jam mata pelajaran yang tidak saya senangi.					
7.	Saya mendukung razia yang dilakukan guru secara rutin untuk menjaring pelanggaran siswa.					
8.	Saya membayarkan uang SPP yang diberikan orang tua secara tepat waktu.					
9.	Saya tidak setuju pemberian hukuman pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.					
10.	Saya mendukung sanksi tegas terhadap kenakalan siswa.					
No.	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
11.	Merokok di sekolah selain melanggar peraturan juga memberi dampak pengaruh negatif kepada siswa lain.					
12.	Dalam berpakaian seragam sekolah saya hanya mengikuti mode dan jarang mematuhi tata tertib sekolah.					
13.	Saya sering membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung.					
14.	Saya lebih suka menyontek saat ulangan daripada belajar.					
15.	Saya tidak suka bekerja sama dengan teman saat mengikuti ujian.					

16.	Saya hanya melihat saja ketika sesama teman berkelahi.					
17.	Saya tidak mau mengikuti ajakan teman untuk tawuran dengan siswa sekolah lain.					
18.	Saya akan melaporkan kepada guru bila terjadi pemerasan pada sesama siswa.					
19.	Saya tidak pernah memalsukan surat ijin dengan alasan sakit.					
20.	Ketika membolos saya sering menggunakan surat ijin.					
21.	Saya selalu berbohong dalam meminta uang untuk membayar SPP.					
22.	Saya tidak pernah berbohong dalam meminta uang untuk urusan sekolah.					
23.	Saya mencuri uang teman untuk jajan.					
No.	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
24.	Selain melanggar hukum, mencuri juga akan mendapat dosa dari Tuhan YME.					
25.	Selain jajan, di kantin saya terbiasa merokok.					
26.	Saya sering bermain <i>handphone</i> saat jam pelajaran berlangsung.					
27.	Saya sering menggunakan <i>handphone</i> untuk bekerja sama dengan teman waktu ujian.					
28.	Saya pernah berjudi dengan teman saat jam pelajaran kosong.					
29.	Saya lebih suka jajan di kantin daripada mengerjakan tugas saat jam pelajaran kosong.					
30.	Saya akan menegur teman yang berbuat gaduh					

	saat jam pelajaran kosong.					
31.	Saya selalu membawa kelengkapan surat saat pergi dengan berkendara motor.					
32.	Saya jarang membawa helm waktu bepergian naik motor.					
33.	Saya selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara motor.					
34.	Ketika naik motor di jalan raya saya sering melanggar lampu merah rambu-rambu lalu lintas.					
35.	Ketika terkena razia polisi saya lebih suka bayar ditempat daripada repot mengikuti sidang di pengadilan.					





Lampiran 10

**Contoh Perhitungan Uji Validitas Hasil Uji Coba Variabel Kesadaran Hukum Item No. 1**

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{40 \times 9639 - (27)(3232)}{\sqrt{\{40 \times 162460 - 729\} \{40 \times 3232^2 - 105000\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{40 \times 9639 - (27)(3232)}{\sqrt{(40 \times 162460) - (729) \times 41783960}}$$

$$r_{xy} = \frac{298296}{105000}$$

$$r_{xy} = 0,352$$

Dari hasil perhitungan diperoleh r-hitung sebesar 0.352. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan r-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan n= 40 dan diperoleh hasil sebesar 0,3. Karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0,352 > 0,3$  maka item pernyataan tersebut **Valid**.

Untuk perhitungan validitas no. 2-35 menggunakan cara yang sama.

## Lampiran 11

**Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Hukum**

No. Item	Analisis	Rhitung	Rtabel	Keterangan
VAR0001	Pearson Correlation	.352	0.3	<b>Valid</b>
VAR0002	Pearson Correlation	.307	0.3	<b>Valid</b>
VAR0003	Pearson Correlation	.364	0.3	<b>Valid</b>
VAR0004	Pearson Correlation	.382	0.3	<b>Valid</b>
VAR0005	Pearson Correlation	.296	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0006	Pearson Correlation	.410	0.3	<b>Valid</b>
VAR0007	Pearson Correlation	.404	0.3	<b>Valid</b>
VAR0008	Pearson Correlation	.558	0.3	<b>Valid</b>
VAR0009	Pearson Correlation	.349	0.3	<b>Valid</b>
VAR0010	Pearson Correlation	.463	0.3	<b>Valid</b>
VAR0011	Pearson Correlation	.366	0.3	<b>Valid</b>
VAR0012	Pearson Correlation	.436	0.3	<b>Valid</b>
VAR0013	Pearson Correlation	.435	0.3	<b>Valid</b>
VAR0014	Pearson Correlation	.370	0.3	<b>Valid</b>
VAR0015	Pearson Correlation	.266	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0016	Pearson Correlation	.366	0.3	<b>Valid</b>
VAR0017	Pearson Correlation	.375	0.3	<b>Valid</b>
VAR0018	Pearson Correlation	.302	0.3	<b>Valid</b>
VAR0019	Pearson Correlation	.407	0.3	<b>Valid</b>
VAR0020	Pearson Correlation	.350	0.3	<b>Valid</b>
VAR0021	Pearson Correlation	.463	0.3	<b>Valid</b>
VAR0022	Pearson Correlation	.366	0.3	<b>Valid</b>
VAR0023	Pearson Correlation	.436	0.3	<b>Valid</b>
VAR0024	Pearson Correlation	.414	0.3	<b>Valid</b>
VAR0025	Pearson Correlation	.328	0.3	<b>Valid</b>
VAR0026	Pearson Correlation	.439	0.3	<b>Valid</b>
VAR0027	Pearson Correlation	.385	0.3	<b>Valid</b>
VAR0028	Pearson Correlation	.478	0.3	<b>Valid</b>
VAR0029	Pearson Correlation	.367	0.3	<b>Valid</b>
VAR0030	Pearson Correlation	.390	0.3	<b>Valid</b>
VAR0031	Pearson Correlation	.323	0.3	<b>Valid</b>
VAR0032	Pearson Correlation	.243	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0033	Pearson Correlation	.223	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0034	Pearson Correlation	.267	0.3	<b>Tidak Valid</b>
VAR0035	Pearson Correlation	.307	0.3	<b>Valid</b>
Sig. (2-tailed)				

N			
---	--	--	--

Berdasarkan hasil uji coba validitas dengan menggunakan rumus *product moment* dari Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program Statistik SPSS dapat diketahui bahwa arti pernyataan, 30 dinyatakan valid karena  $R_{hitung} > R_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% dan N=40 dengan nilai kritis 0,3 sedang 5 (5,15,32,33,34) dinyatakan invalid dan untuk penelitian selanjutnya dibuang.



Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program PKn Universitas Sebelas Maret Surakarta sedang mengadakan penelitian tentang :

**HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KESADARAN HUKUM SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009**

Untuk itu kami mohon kesediaan adik-adik untuk mengisi angket yang kami ajukan ini.

Kami mohon adik-adik dalam mengisi angket ini sebagaimana nyatanya, karena informasi yang adik-adik berikan dapat membantu kerja ilmiah kami. Dan atas bantuan adik-adik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Solo, Mei 2009

Indra Setyo N.  
K 6404035

### **ANGKET KESADARAN HUKUM**

Petunjuk cara pengisian

- A. Isilah identitas anda terlebih dahulu.
- B. Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda centang ( ☐ ) sesuai dengan pilihan.
- C. Selamat mengerjakan.

No.	PERTANYAAN	S	SS	R	S	STS
	Saya merasa bersalah bila melanggar tata tertib					

1.	sekolah.					
2.	Saya akan mengingatkan teman bila ada yang melanggar tata tertib sekolah.					
3.	Saya akan melaporkan apabila ada teman yang membawa <i>handphone</i> ke sekolah.					
4.	Saya acuh bila melihat teman merokok di kantin sekolah.					
5.	Saya akan membolos bila ada jam mata pelajaran yang tidak saya senangi.					
6.	Saya mendukung razia yang dilakukan guru secara rutin untuk menjaring pelanggaran siswa.					
7.	Saya membayarkan uang SPP yang diberikan orang tua secara tepat waktu.					
8.	Saya tidak setuju pemberian hukuman pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.					
No.	PERTANYAAN	S	SS	R	S	STS
9.	Saya mendukung sanksi tegas terhadap kenakalan siswa.					
10.	Merokok di sekolah selain melanggar peraturan juga memberi dampak pengaruh negatif kepada siswa lain.					
11.	Dalam berpakaian seragam sekolah saya hanya mengikuti mode dan jarang mematuhi tata tertib sekolah.					
12.	Saya sering membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung.					

13.	Saya lebih suka menyontek saat ulangan daripada belajar.					
14.	Saya hanya melihat saja ketika sesama teman berkelahi.					
15.	Saya tidak mau mengikuti ajakan teman untuk tawuran dengan siswa sekolah lain.					
16.	Saya akan melaporkan kepada guru bila terjadi pemerasan pada sesama siswa.					
17.	Saya tidak pernah memalsukan surat ijin dengan alasan sakit.					
18.	Ketika membolos saya sering menggunakan surat ijin.					
19.	Saya selalu berbohong dalam meminta uang untuk membayar SPP.					
20.	Saya tidak pernah berbohong dalam meminta uang untuk urusan sekolah.					
No.	PERTANYAAN	S	SS	R	S	STS
21.	Saya sering mencuri uang teman untuk jajan.					
22.	Selain melanggar hukum, mencuri juga akan mendapat dosa dari Tuhan YME.					
23.	Selain jajan, di kantin saya terbiasa merokok.					
24.	Saya sering bermain <i>handphone</i> saat jam pelajaran berlangsung.					
25.	Saya sering menggunakan <i>handphone</i> untuk bekerja sama dengan teman waktu ujian.					
26.	Saya sering menggunakan <i>handphone</i> untuk bekerja sama dengan teman waktu ujian.					

27.	Saya pernah berjudi dengan teman saat jam pelajaran kosong.					
28.	Saya lebih suka jajan di kantin daripada mengerjakan tugas saat jam pelajaran kosong.					
29.	Saya akan menegur teman yang berbuat gaduh saat jam pelajaran kosong.					
30.	Ketika terkena razia polisi saya lebih suka bayar ditempat daripada repot mengikuti sidang di pengadilan.					

## Lampiran 13

**Hasil Perhitungan Korelasi Belahan Ganjil dan Genap**

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{115372 - (2090)(2128)/40}{\sqrt{\{(113822 - (2090)^2/40)(113152 - (2128)^2/40)\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{115872 - 114188}{\sqrt{4620 \times 11323088}}$$

$$r_{xy} = \frac{1.484}{2.2871}$$

$$r_{xy} = 0,648$$

**Perhitungan Uji Reliabilita dengan Spearman Brown :**

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{12} / \sqrt{2 \times 2 / 2}}{1 + r_{12} / \sqrt{2 \times 2 / 2}}$$

$$= \frac{2 \times 0,648}{1 + 0,648}$$

$$= 0,786$$

Dari hasil perhitungan diperoleh Reabilitas sebesar 0,786. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan  $r_{\text{tabel}}$  pada tingkat signifikansi 5% dengan  $n=40$  dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,3. Karena  $r_{11} > r_1$  atau  $0,786 > 0,3$  maka item pernyataan angket tersebut **reliabel**.

Lampiran 14

#### DATA INDUK PENELITIAN

NO.	Pembelajaran Pkn (X)	Kesadaran Hukum (Y)
1	38	39
2	38	
3	40	39
4	40	40
5	40	42
6	41	42
7	43	42
8	43	42
9	45	44
10	45	44
11	45	44
12	45	45
13	45	45
14	47	48

15	47	48
16	48	49
17	48	49
18	49	50
19	50	50
20	50	51
21	50	52
22	50	52
23	52	53
NO.	Pembelajaran Pkn (X)	Kesadaran Hukum (Y)
24	54	53
25	54	55
26	54	55
27	55	56
28	56	56
29	57	56

30	57	58
31	57	58
32	58	60
33	58	62
34	59	66
35	60	68
36	60	68
37	72	70

38	75	75
39	80	80
40	85	83
Jumlah	2090	2128
Rataan	52.25	53.2
SD	10.88341	11.26875
Max	85	83
Min	83	39

#### Lampiran 15

#### Uji Normalitas Variabel Pembelajaran PKn (X)

No	Xi	f	Xi^2	f.Xi	f.Xi^2	Zi	F(Zi)	S(Zi)	F(Zi)-S(Zi)
1	40	3	600	120	14400	-1.2574	0.1043	0.1081	0.0038
2	45	7	025	315	99225	-0.755	0.2251	0.2973	0.0722
3	47	4	209	188	35344	-0.554	0.2898	0.4054	0.1156
4	50	5	500	250	62500	-0.2526	0.4003	0.5405	0.1402
5	54	4	916	216	46656	0.1494	0.5594	0.6486	0.0893
6	55	1	025	55	3025	0.2499	0.5987	0.6757	0.077
7	57	4	3249	228	51984	0.4508	0.6739	0.7838	0.1098
8	58	2	3364	116	13456	0.5513	0.7093	0.8378	0.1285
9	60	2	3600	120	14400	0.7523	0.7741	0.9189	0.1449
10	75	2	5625	150	22500	2.2596	0.981	0.973	0.0151
11	85	4	225	340	115600	3.2644	0.9995	1	0.0005
<b>jumlah</b>	626	40	7338	2098	479090				
<b>Rataan</b>	56.9091	3						Lmax	0,1449
<b>SD</b>	13.0878	7						Ltabel	0,1537
		4						<b>kpsn</b>	<b>NORMAL</b>

Harga  $L_o$  adalah 0.1449 sedangkan  $L$  tabel ( $n=40$ ,  $\alpha=0,05$ ) adalah 0,1426  
 Karena harga  $L_o < L_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi **normal**.

## Lampiran 16

**Uji Normalitas Variabel Kesadaran Hukum**

No	Xi	F	Xi <sup>2</sup>	f.Xi	f.Xi <sup>2</sup>	Zi	F(Zi)	S(Zi)	F(Zi)-S(Zi)
1	39	3	1521	117	13689	-1.257	0.1043	0.1081	0.0038
2	40	1	1600	40	1600	-0.755	0.2251	0.2973	0.0722
3	42	4	1764	168	28224	-0.554	0.2898	0.4054	0.1156
4	44	3	1936	132	17424	-0.253	0.4003	0.5405	0.1402
5	45	2	25	90	8100	0.1494	0.5594	0.6486	0.0892
6	48	2	2304	96	9216	0.2499	0.5987	0.6757	0.077
7	49	2	2401	98	9604	0.4508	0.6739	0.7838	0.1099
8	50	2	2500	100	10000	0.5513	0.7093	0.8378	0.1285
9	51	2	2601	102	10404	0.7523	0.7741	0.9189	0.1448
10	52	2	2704	104	10816	2.2596	0.9581	0.9730	0.0149
11	52	2	2704	104	10816	3.2644	0.9995	1	0.0005
12.	53	2	2809	106	11236	3.8771	1.2311	1.3097	0.0786
13.	55	2	3025	110	12100	3.9921	1.3328	1.4298	0.097
14.	56	3	3136	168	28224	4.1342	1.3899	1.5002	103
15.	58	2	3364	116	13456	4.2223	1.4578	1.5763	0.1185
16.	60	1	3600	60	3600	4.4297	1.4906	1.5875	0.0969
17.	62	1	3844	62	3844	4.5096	1.5094	1.6876	0.1782
18.	66	1	4356	66	4356	4.5922	1.5408	1.6098	0.069
19.	68	2	4624	136	19496	4.6076	1.5892	1.6984	0.1092
20.	70	1	4900	70	4900	4.9587	1.8794	1.9874	0.108
21.	75	1	5625	75	5625	5.5609	1.9253	2.1085	0.1832
22.	80	1	6400	80	6400	6.1024	1.9507	2.1538	0.2031
23.	83	1	6889	83	6889	6.7902	1.9932	2.1702	0.177
<b>jmlh</b>	1298							Lmax	0.1448
<b>Rataan</b>	56.4348							Ltabel	0,1537
<b>SD</b>	12.3944								
								<b>kpsn</b>	<b>NORMAL</b>

Harga Lo adalah 0.1449 sedangkan L tabel ( $n=40$ ,  $\alpha=0,05$ ) adalah 0,1426  
 Karena harga Lo < Ltabel, maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi **normal**.





## B. Komputasi

Berdasarkan tabel kerja diperoleh:

$$\begin{aligned} \text{a.} &= \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{N(\sum X^2) - (\sum X)^2} \\ &= \frac{(2118)(11382) - (2090)(115872)}{40(11382) - (2090)^2} \\ &= 55.7310 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b.} &= \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{40(115872) - (1090)(2128)}{40 \cdot 11382 - (2090)^2} \\ &= 0.4738 \end{aligned}$$

Jumlah kuadrat masing-masing varian

$$\begin{aligned} \text{JK}_{(T)} &= \sum Y^2 \\ &= 118162 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK}_{(a)} &= \frac{(\sum Y)^2}{N} \\ &= \frac{(2128)^2}{40} \end{aligned}$$

$$= 566048.5$$

$$\begin{aligned} \text{JK}_{(b/a)} &= b \left[ \sum XY \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N} \right] \\ &= \frac{0,3263 [ 115872 - \underline{2090 \cdot 2128} ]}{40} \end{aligned}$$

$$= 1697.91$$

$$\begin{aligned} \text{JK}_{(S)} &= \text{JK}_{(T)} - \text{JK}_{(a)} - \text{JK}_{(b/a)} \\ &= 118162 - 566048.5 - 1697.91 = 7236.93 \end{aligned}$$

$$\text{JK}_{(G)} = \sum \left\{ \sum Y - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}$$

$$= \frac{[2128 - \frac{(92128)^2}{40}]}{40}$$

$$= 2409.10$$

$$\begin{aligned} JK_{(TC)} &= JK(S) - JK(G) \\ &= 7236.93 - 2409.10 \\ &= 4827.83 \end{aligned}$$

Derajat kebebasan (dk) adalah :

$$\begin{aligned} K &= 24 & D_{ks} &= 40 - 2 = 38 \\ D_{ka} &= 1 & dk_{TC} &= 24 - 2 = 22 \\ D_{kb/a} &= 1 & dk_G &= 40 - 22 = 18 \end{aligned}$$

Rerata masing-masing sumber varian

$$RJK_a = \frac{JK_a}{dk_a} = \frac{566048.5}{1} = 566048.5$$

$$RJK_{b/a} = \frac{JK_{b/a}}{Dk_{b/a}} = \frac{1697.91}{1} = 1697.91$$

$$RJK_s = \frac{JK_s}{dks} = \frac{7236.93}{38} = 190.44$$

$$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k - 2} = \frac{4827.83}{18 - 2} = 301.74$$

$$RJK_G = \frac{JK_{(G)}}{N - k} = \frac{2409.1}{18} = 133.84$$

Uji Linieritas Regresi

$$F_1 = \frac{RJK_{TC}}{RJK_G} = \frac{301.84}{133.84} = 2.25$$

Uji Keberartian Regresi

$$F_2 = \frac{RJK_{b/a}}{RJK_s} = \frac{1697.91}{190.44} = 8.91$$

### C. Daerah Kritik

$$\begin{aligned} F_1 &= F(0.05, k-2, n-k) \\ &= F(0.05, 24, 24) \\ &= 1.98 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 DK &= \{ F / F > (\alpha, dk) \} \\
 &= \{ F / F > (1.98) \} \\
 F2 &= F (0.05, dka, n-2) \\
 &= F (0.05, 1.48) \\
 &= 4.04 \\
 DK &= \{ F / F > (\alpha, dk) \} \\
 &= \{ F / F > 4.04 \}
 \end{aligned}$$

#### D. Keputusan Uji

Untuk uji linieritas

Ho tidak ditolak karena  $F_{hitung} = 2.21$  jatuh diluar daerah kritik. Jadi model regresi antara X dengan Y adalah **linier**.

Untuk keberartian

Ho tidak diterima karena  $F_{hitung} = 8.91$  jatuh didalam daerah kritik. Jadi model regresi antara X dengan Y adalah **berarti**.

Lampiran 18

#### UJI INDEPENDENSI Pembelajaran PKn (X) atas Kesadaran Hukum(Y)

Diketahui :

$$\begin{aligned}
 N &= 40 \\
 \sum X &= 2090.0 \\
 \sum X^2 &= 4618.5 \\
 \sum Y &= 2128.0 \\
 \sum Y^2 &= 4952.4
 \end{aligned}$$

Untuk menentukan uji independen dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \\
 &= \frac{14792}{\sqrt{11832 \cdot 118162}} \\
 &= \frac{14792}{36683.15} \\
 &= 0.4033
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai  $r_{1Y} = 0.4033$ . Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai  $r_{tabel}$  dengan  $N = 40$  dan taraf signifikasi 5% sebesar

0.287. Karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti antara X dengan **ada hubungan**.

#### Lampiran 19

#### Uji Keberartian Koefisien Korelasi

##### a. Hipotesis

$H_0$  = koefisien koerelasi tidak berarti

$H_1$  = koefisien koerelasi berarti

##### b. Taraf signifikasi = 5%

##### c. Daerah Kritik

$H_0$  ditolak apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Dari tabel diperoleh  $t_{(0.95)(40)} = 1.58$

##### d. Statistik Uji

$$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Untuk koefisien korelasi X dengan  $r = 0.4033$

$$t = \frac{0.4033 \sqrt{38}}{\sqrt{1 - (0.4033)^2}}$$

$$= 2.97$$

##### e. Keputusan Uji

Untuk koefisien korelasi X dengan  $t_{hitung} = 2.97$  karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka koefisien korelasinya **berarti**

#### Lampiran 20

### Garis Regresi Sederhana Y atau X

Diketahui :

$$N = 40$$

$$\Sigma X = 1123$$

$$\Sigma X^2 = 32467$$

$$\Sigma Y = 3550$$

$$\Sigma Y^2 = 317130$$

Model regresi yang dicari adalah

$$Y = a + bX$$

Dimana

$$b = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{N(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$= \frac{40(115872) - (2090)(2128)}{40(11382) - (2090)^2}$$

$$= 1.0174$$

$$a = Y - b X_i$$

$$= 120.44 - (1.0174)(113840)$$

$$= 108.8579$$

Sehingga persamaan regresi Y atas X

$$\hat{y} = \mathbf{108.8579 + 1.0174}$$